



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 81 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

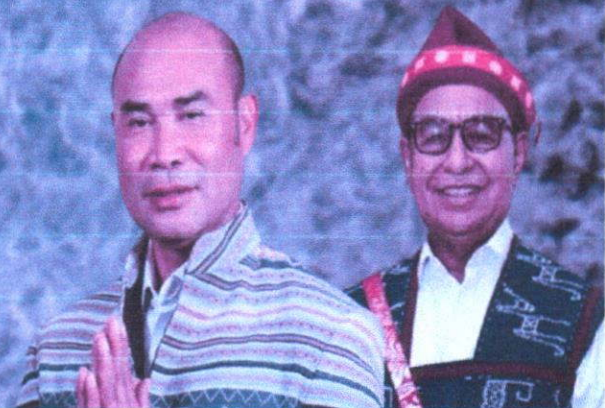
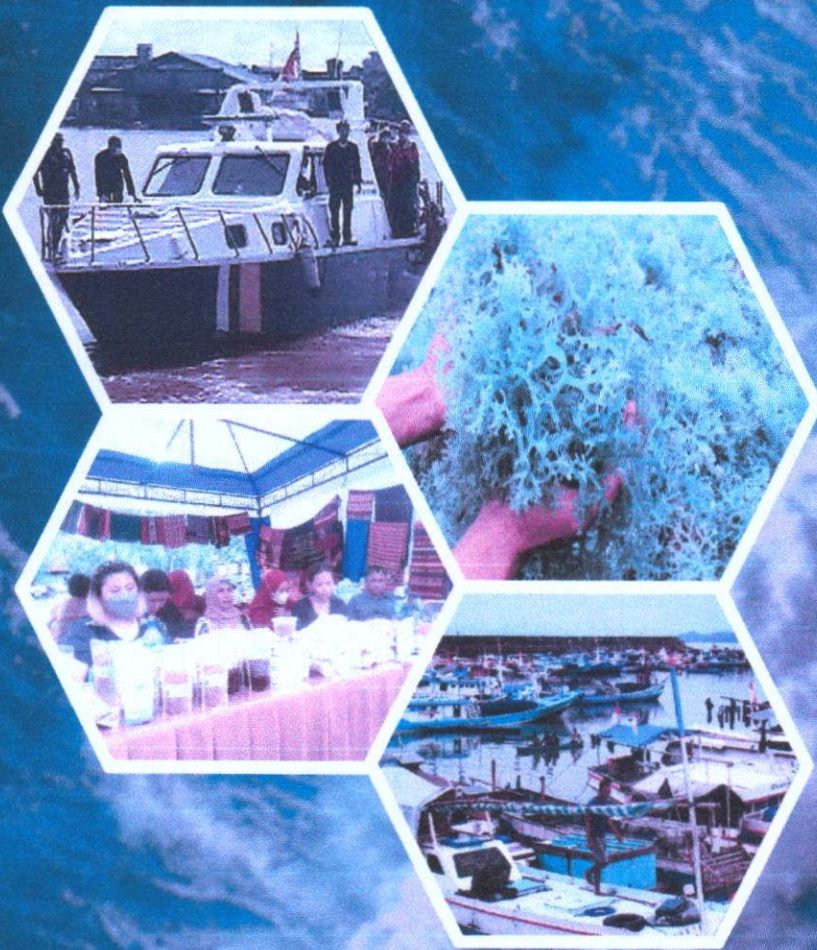
Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

2



**PETA PROSES BISNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: /KEP/HK/2021 tentang Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	
i. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	1
ii. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
iii. Telaahan Peran Serta dan Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah	4
iv. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4
v. Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	7
A. Peta Proses	7
B. Peta Sub Proses	10
DKP-01. Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	10
DKP -02. Pengelolaan Perikanan Tangkap	11
DKP -03. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	12
DKP -04. Pengelolan Perikanan Budidaya.....	13
DKP -05. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14
DKP -06. Pengelolaan Dan Pengembangan SDM	15
DKP -07. Pengelolaan Data dan Informasi.....	16

DKP-08. Perencanaan Dan Penatausahaan Keuangan	17
DKP-09. Pengawasan Internal	18
DKP-10. Pembangunan Zona Integritas	19
C. Peta Relasi	20
D. Peta Lintas Fungsi	21
DKP-01.1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi	21
DKP-01.2. Penertiban Izin Pemanfaatan Ruang Laut Dibawah 12 Mil DiLuar Minyak dan Gas Bumi.....	22
DKP-01.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil	23
DKP-02.1. Pengelolaan Penangkapa Ikan Di Wilayah LAut Sampai Dengan 12 Mil	24
DKP-02.2. Penertiban Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	25
DKP-02.3. Penertiban Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran S/D 30 GT Di Laut, Sungai Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	26
DKP-03.1. Fasilitasi Pemasaran Hasil Perikanan.....	27
DKP-03.2. Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengelolaan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar.....	28
DKP-04.1. Penertiban Izin Usaha Perikanan Budidaya Ikan Yang Diusahakannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Darah Provinsi	29
DKP-04.2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Dilaut	30
DKP-05.1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	31
DKP-06.1. Pengelolaan Data Dan Informasi	32

DKP-06.2. Perencanaan Dan Formasi Pengawai	33
DKP-06.3. Penilaian Presentasi Kinerja	34
DKP-06.4. Kenaikan Pangkat/Pensiun ASN	35
DKP-06.3. Penilaian Disiplin Pengawai	36
DKP-06.5. Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet.....	36
DKP-06.3. Pengelolaan Website	37
DKP-07.1. Pengelolaan Aplikasi E-Nadi	38
DKP-08.1. Perencanaan	39
DKP-08.2. Penatausahaan Keuangan	40
DKP-09.1. Pelaksanaan SPIP	41
DKP-10.1. Pembangunan Zona Integritas	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018 – 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Agustus 2022

Pt KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



GEORGE M.HADJOH,SH

PEMBINA Tk.I

NIP. 196505281986031014

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 81 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023

**TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

"NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;

3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah 2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua Penduduk	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan 1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

III. Telaahan Peran Serta Dan Keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu “NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESSATUAN REPUBLIK INDONESIA” dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); Dari 5 (lima) Misi yang ada 2 (dua) misi yang berkaitan erat dengan Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu **Misi 1** : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil dan berkaitan juga **Misi 2** : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung misi *kesatu yaitu “Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil” dan kedua yaitu “Yakni membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)”*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 5 (lima) program yang terdiri dari:

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

VI. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah



Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

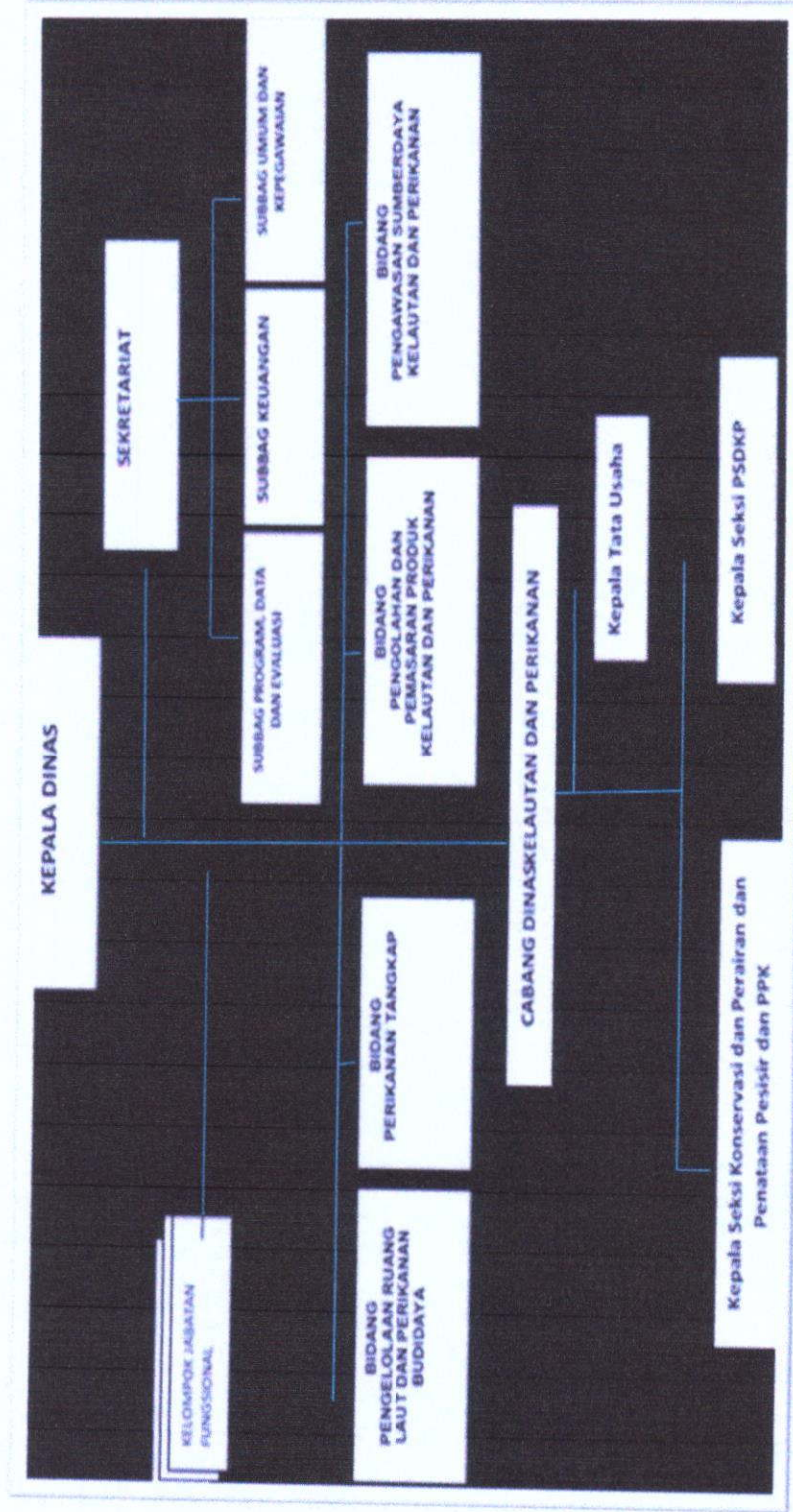
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sektor kelautan dan perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sektor kelautan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sektor kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya
4. Bidang Perikanan Tangkap
5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
7. Cabang Dinas (ada 7 Cabang Dinas)

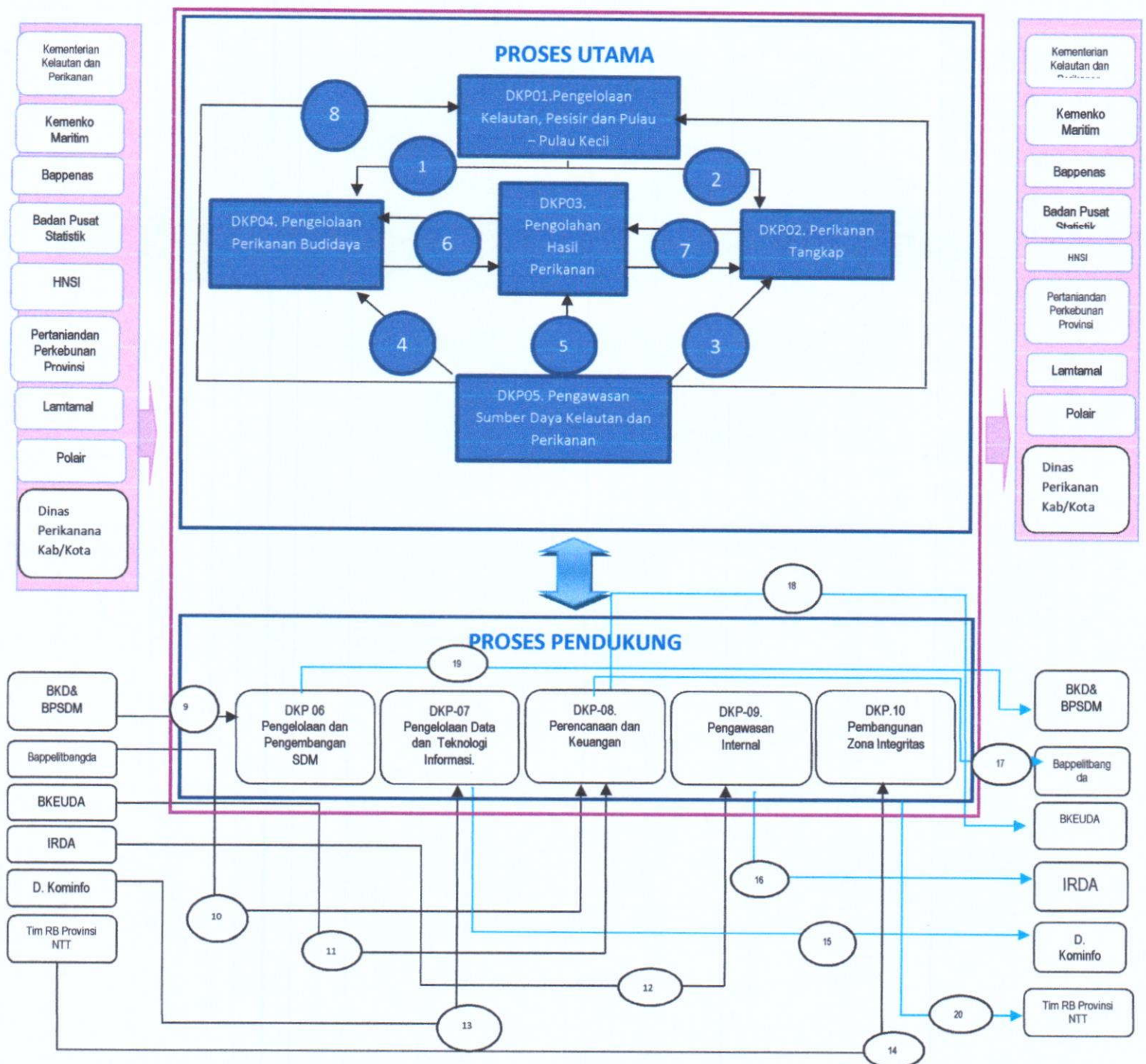
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



VII. Peta Proses Bisnis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan Proses:

1. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan : (a) Program Pengelolaan kelaut dan Pulau – Pulau Kecil yaitu merencanakan operasional pengendalian dan evaluasi kegiatan tata ruang laut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang berlaku (b) Pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan Pembudidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
2. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan : (a) Program Pengelolaan kelaut dan Pulau – Pulau Kecil yaitu merencanakan operasional pengendalian dan evaluasi kegiatan tata ruang laut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang berlaku (b) Pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan Pembudidaya dalam rangka peningkatan produksi perikanan Tangkap;
3. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan : (a) Program perikanan tangkap : merencanakan operasional, pengendalian, dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan, dan kenelayaan, pengendalian dan penangkapan ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, (b) melakukan operasional, Pertiban serta pemantauan hasil produksi perikanan, pada unit usaha yang bergerak pada bidang perikanan ;
4. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan : (a) Program perikanan Budidaya : merencanakan operasional dan mengevaluasi kegiatan perikanan budidaya (b) melakukan operasional, Pertiban serta pemantauan hasil produksi perikanan, pada unit usaha yang bergerak pada bidang perikanan ;
5. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan : (a) program pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan melakukan operasional, serta pemantauan hasil produksi perikanan, pada unit usaha yang bergerak pada bidang perikanan (b) melakukan peangawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan penegakan hukum perikanan dan kelautan. ;
6. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan : (a) Program perikanan Budidaya : merencanakan operasional dan mengevaluasi kegiatan perikanan budidaya (b) melakukan operasional, serta pemantauan hasil produksi perikanan, pada unit usaha yang bergerak pada bidang perikanan.
7. Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan : Program perikanan tangkap : merencanakan operasional, pengendalian, dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan, dan kenelayaan, pengendalian dan penangkapan ikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, (b). program pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan melakukan operasional, serta pemantauan hasil produksi perikanan, pada unit usaha yang bergerak pada bidang perikanan
8. Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan : (a) Program Pengelolaan kelaut dan Pulau – Pulau Kecil yaitu merencanakan operasional pengendalian dan evaluasi kegiatan tata ruang laut berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prosedur yang berlaku (b) melakukan peangawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan penegakan hukum perikanan dan kelautan.;
9. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
10. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
11. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;

12. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
13. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
15. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
17. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
18. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
19. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
20. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.

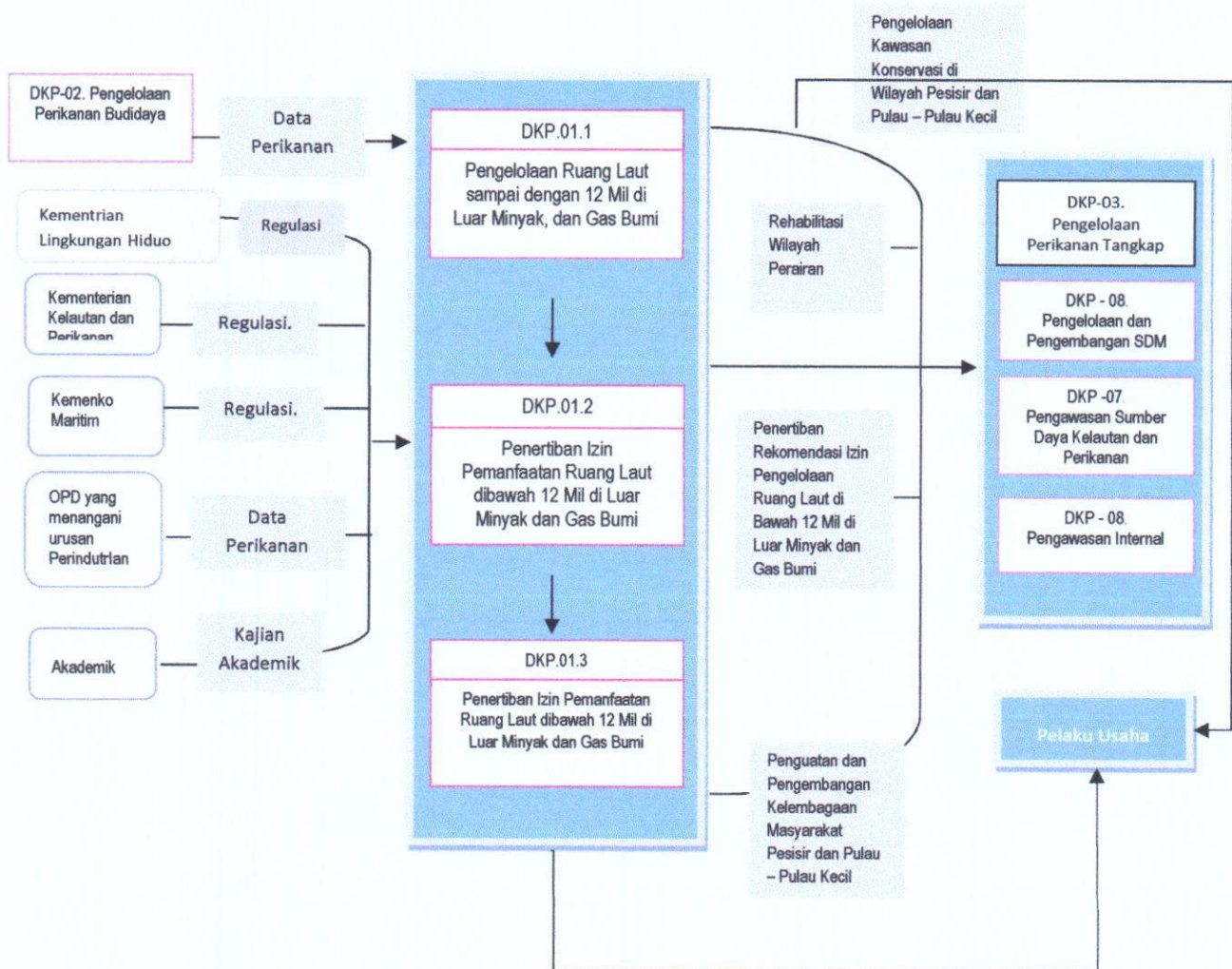


B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

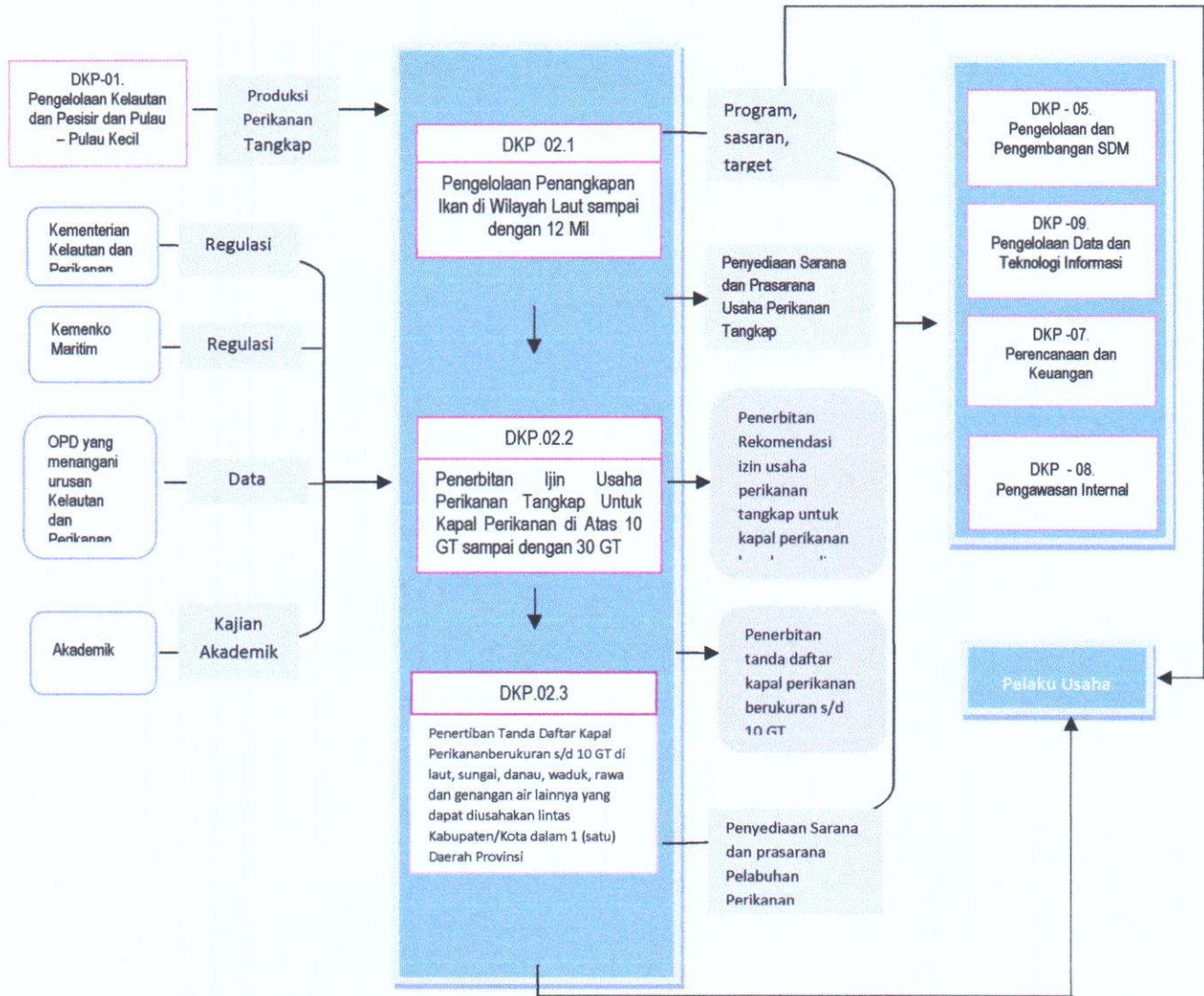
PETA SUB PROSES

DKP-01. PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL

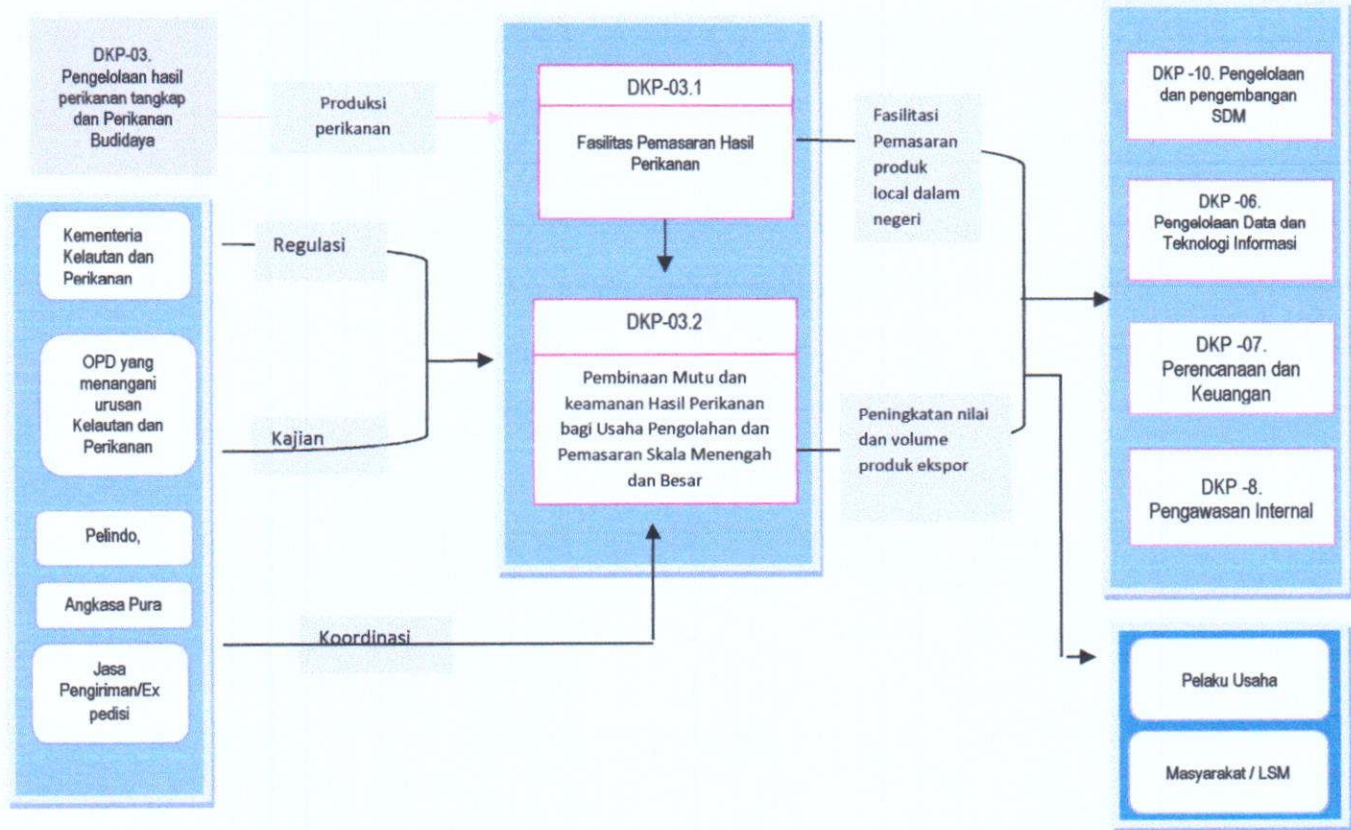


PETA SUB PROSES

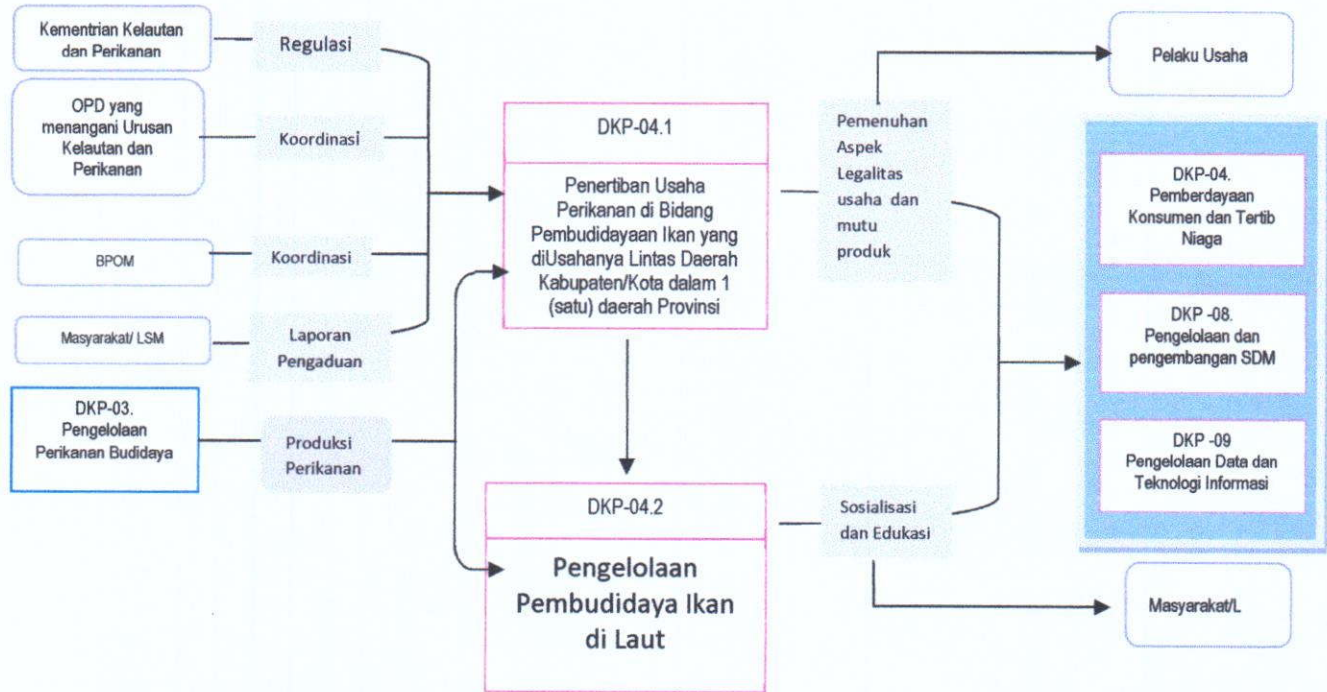
DKP-02. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP



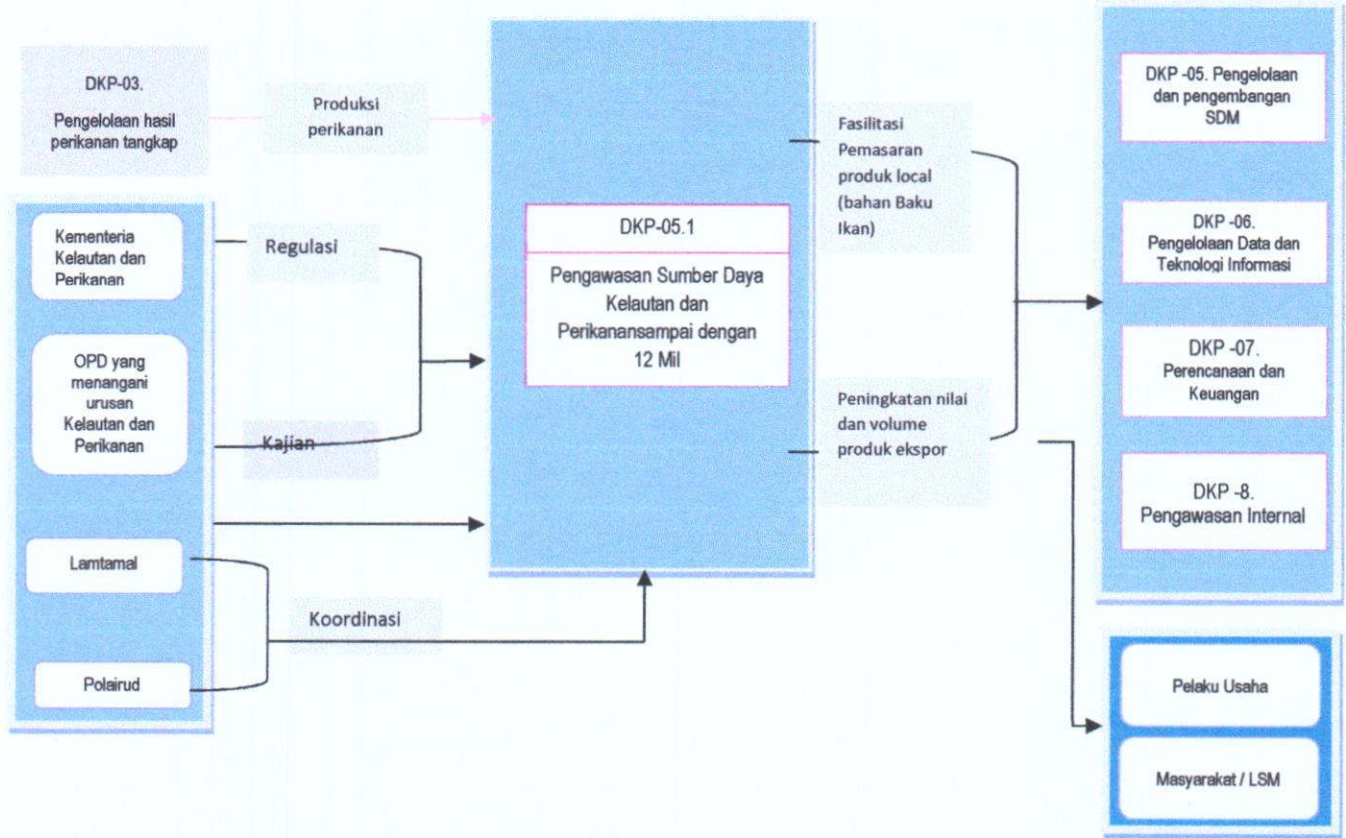
PETA SUB PROSES DKP 03. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN



PETA SUB PROSES DKP-04. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

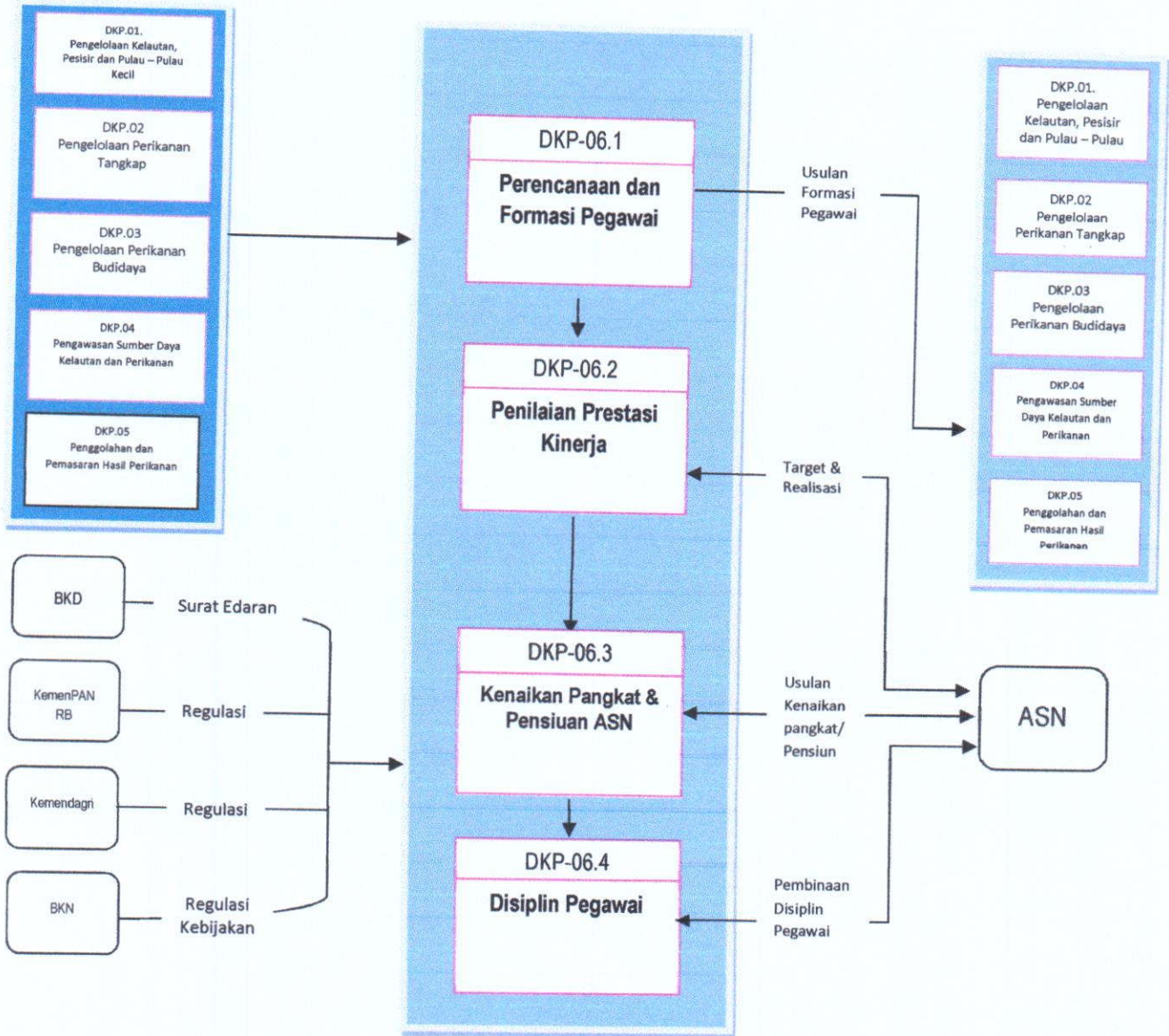


PETA SUB PROSES DKP 05. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

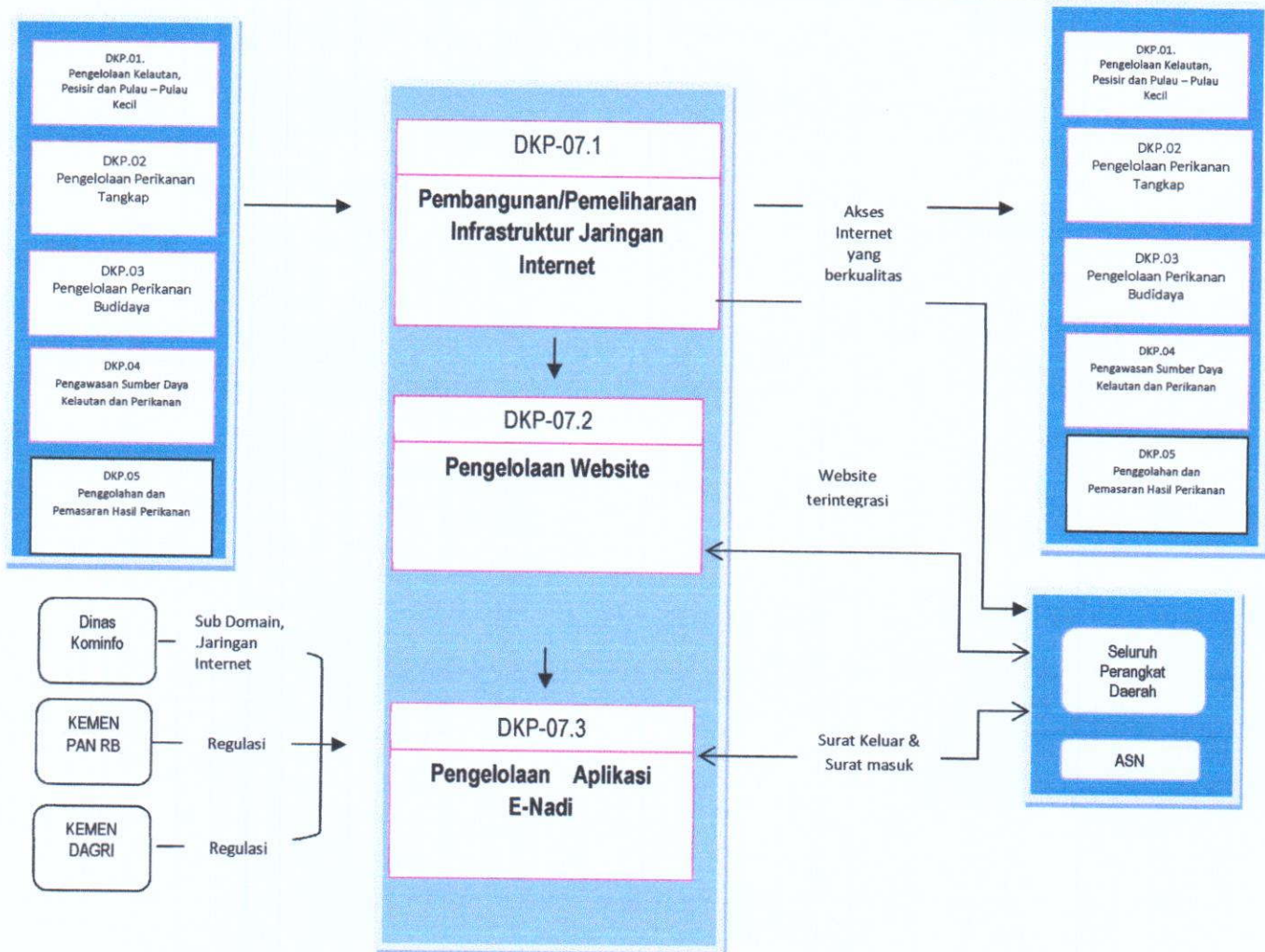


PETA SUB PROSES

DKP-06. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

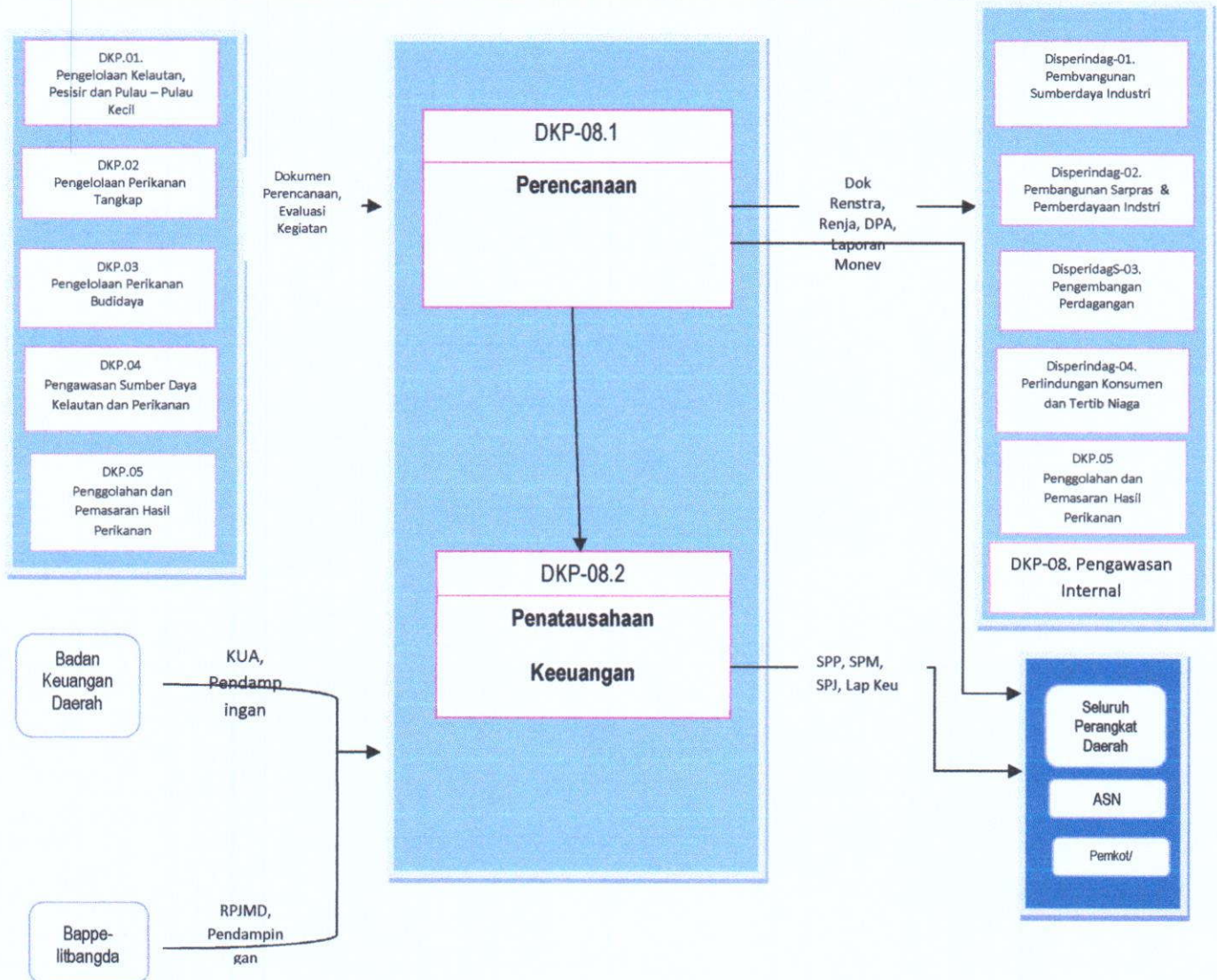


PETA SUB PROSES DKP-07 PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

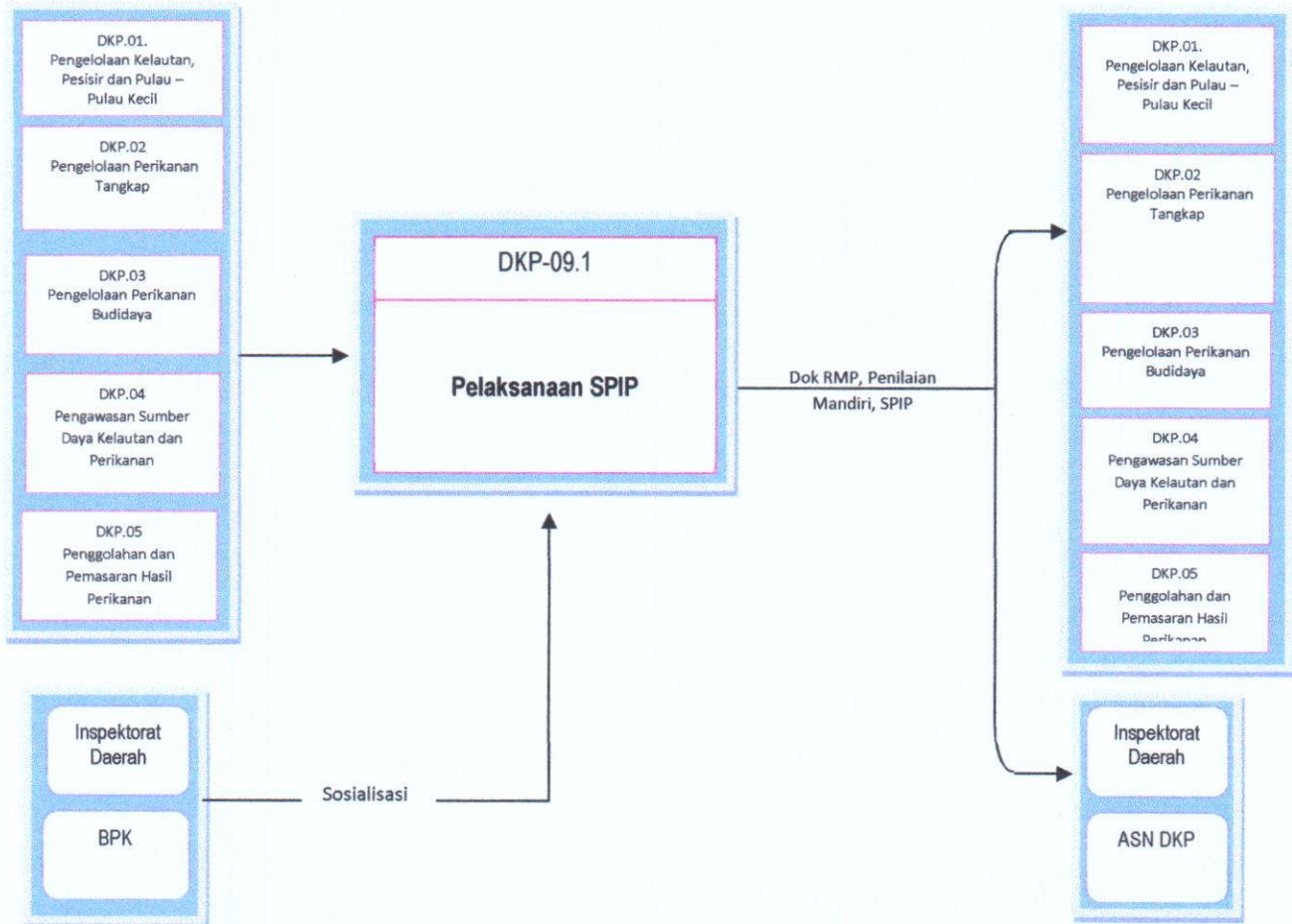


PETA SUB PROSES

DKP -08 PERENCANAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

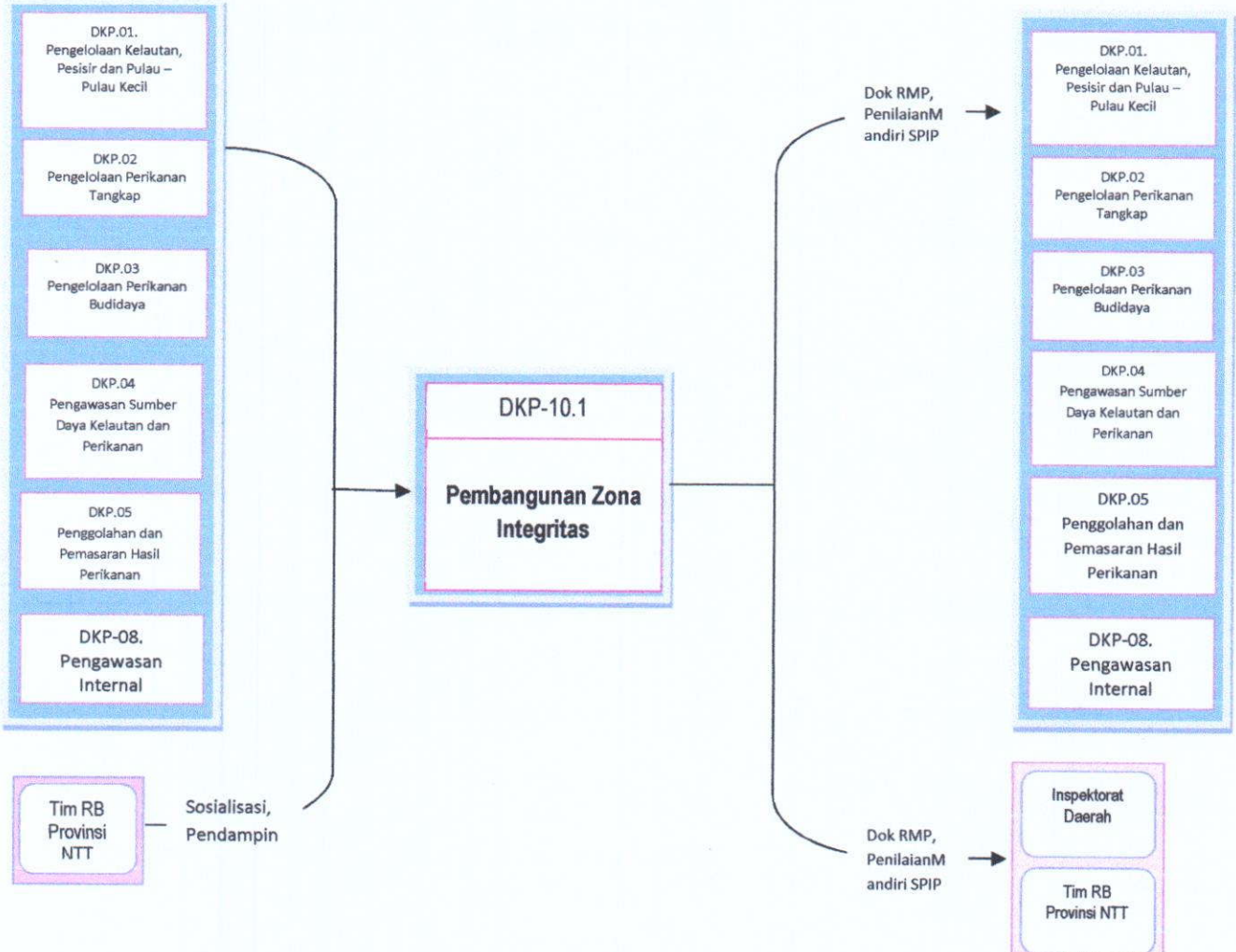


PETA SUB PROSES
DIKP-09. PENGAWASAN INTERNAL



PETA SUB PROSES

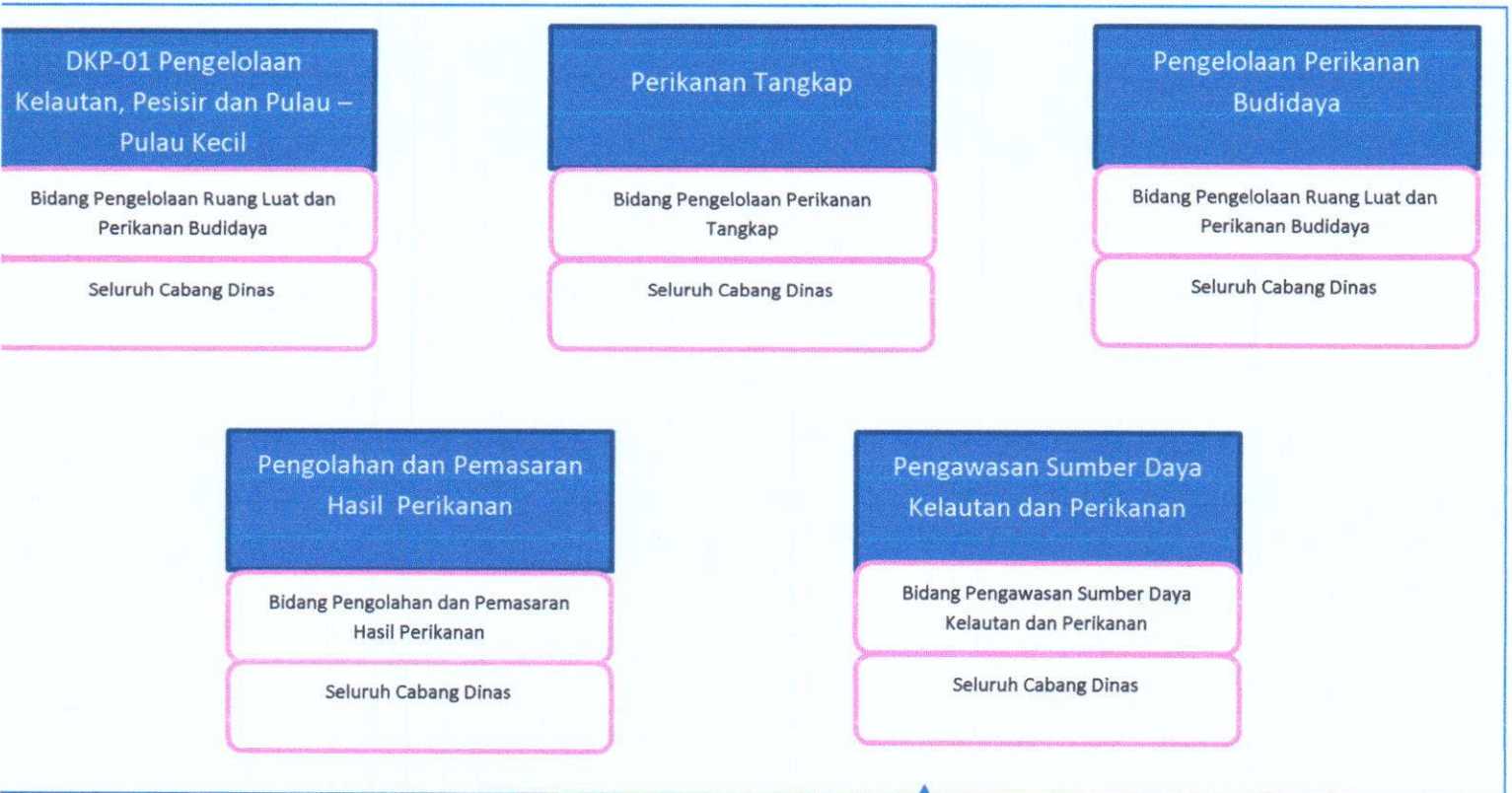
DKP-10. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



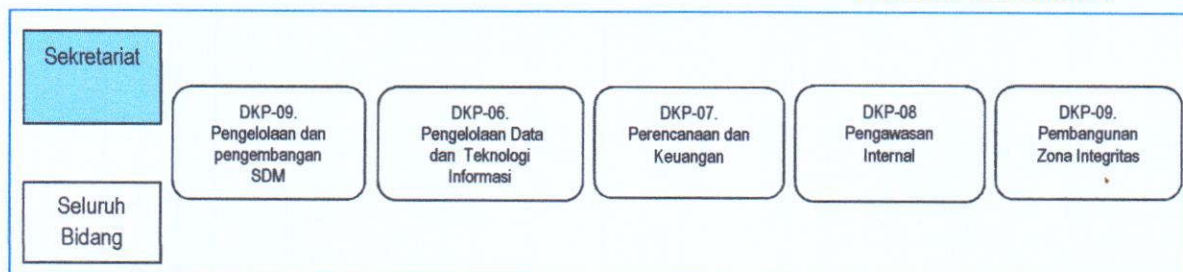
C. PETA RELASI

Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

PROSES UTAMA



PROSES PENDUKUNG

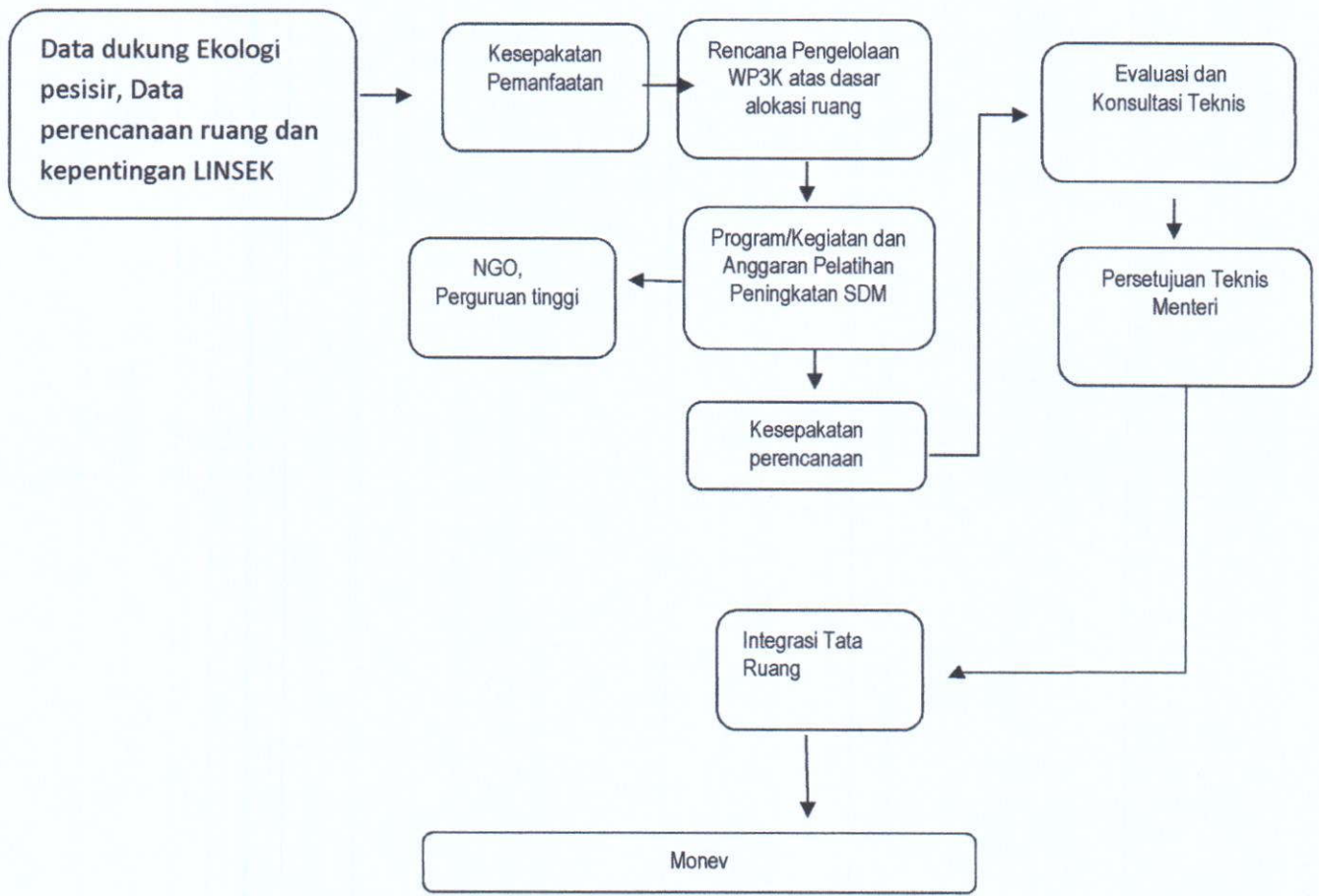


D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/ fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

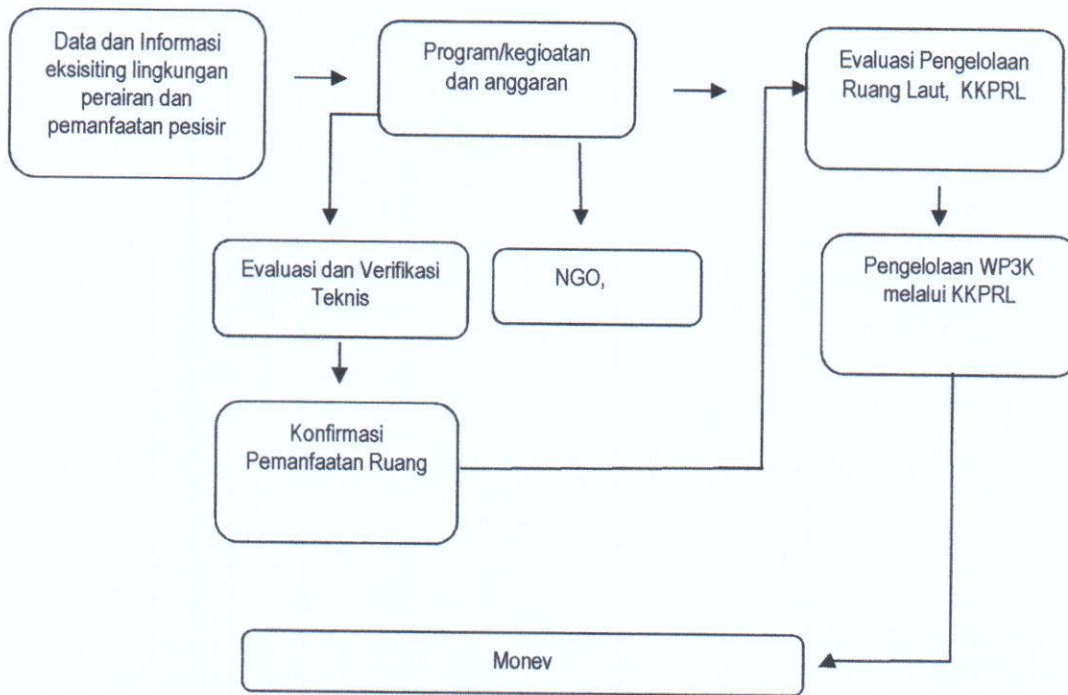
DKP-01.1.
PENGLOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK, DAN GAS BUMI

DINAS PERIKANAN KAB/KOTA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
-----------------------------	---	-----



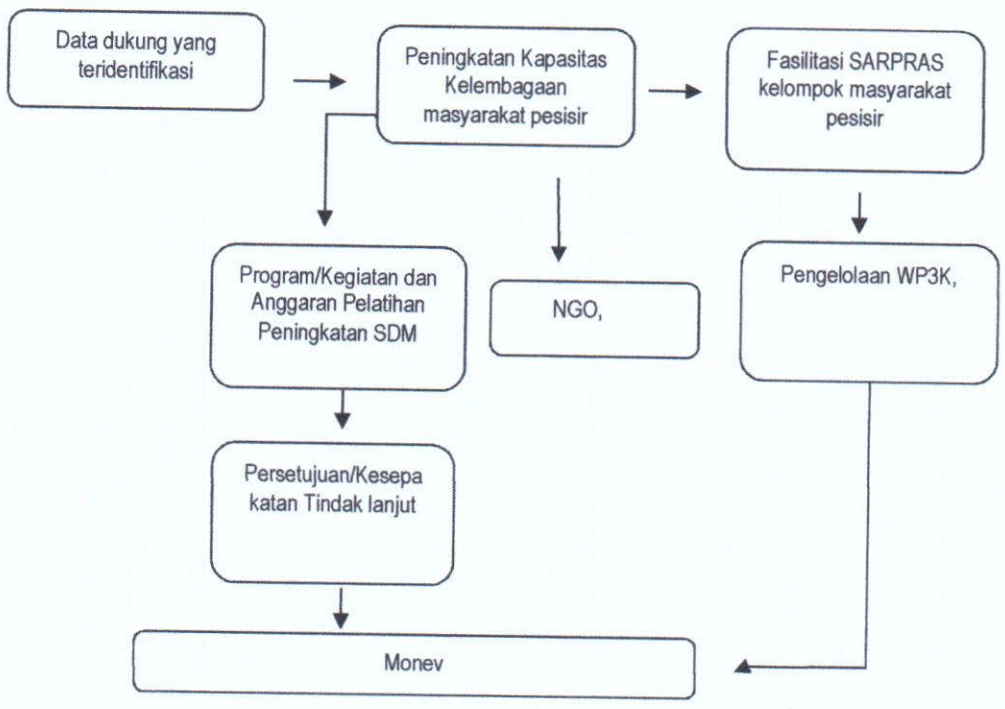
DKP-01.2.
PENERTIBAN IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DIBAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI

DINAS PERIKANAN KAB/KOTA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
-----------------------------	---	-----



DKP-01.3.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

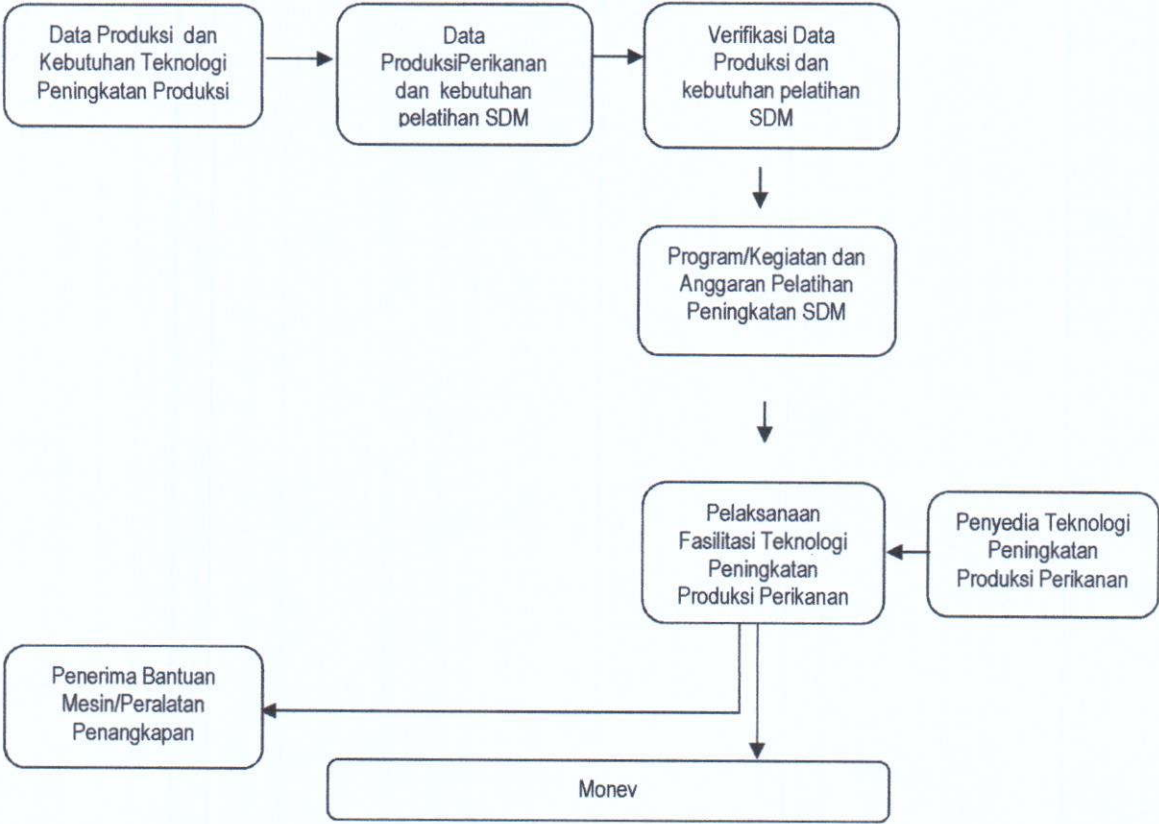
DINAS PERIKANAN KAB/KOTA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
-----------------------------	---	-----



sp

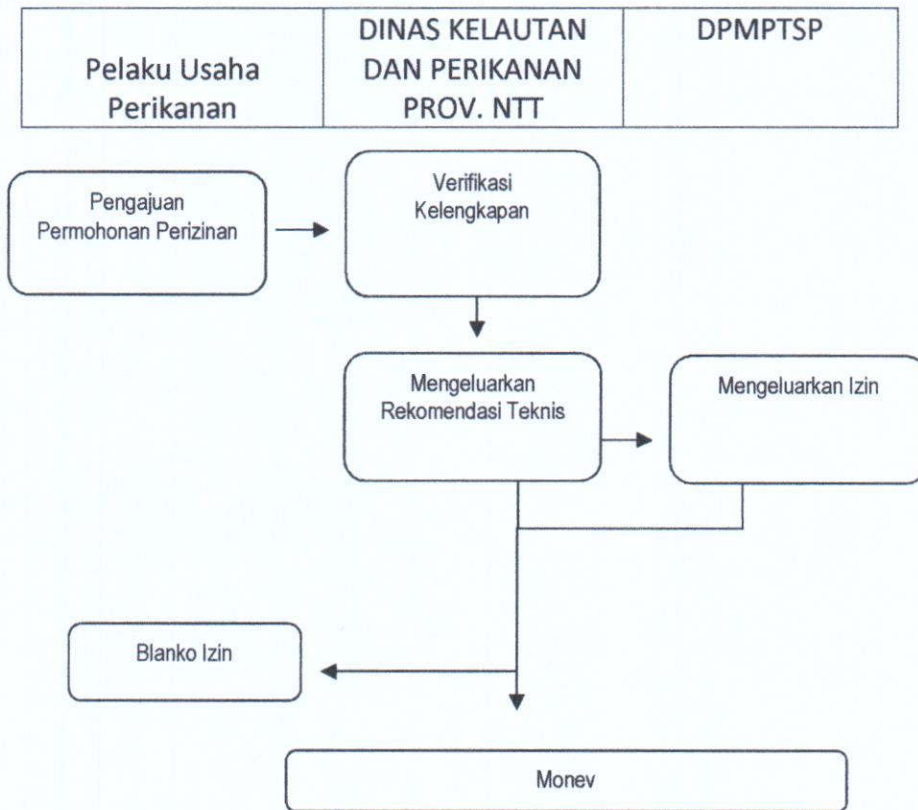
DKP-02.1.
PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

Nelayan/Perusahaan	DINAS PERIKANAN KAB/KOTA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
---------------------------	---------------------------------	---	------------



57

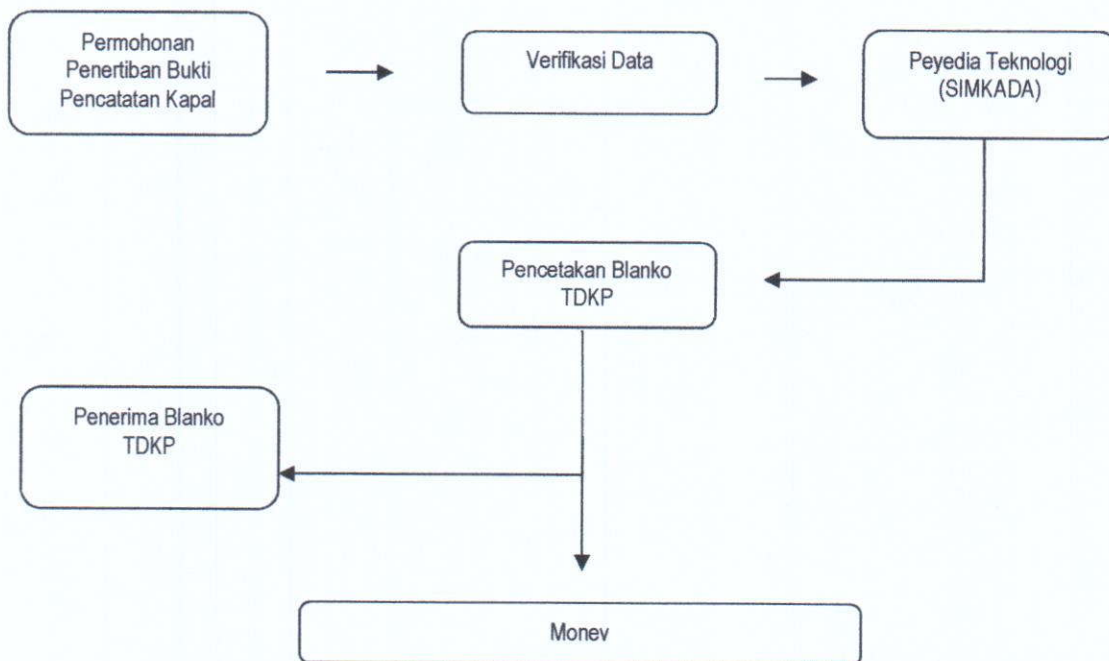
DKP-02.2.
PENERBITAN IJIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN DI ATAS 10 GT
SAMPAI DENGAN 30 GT

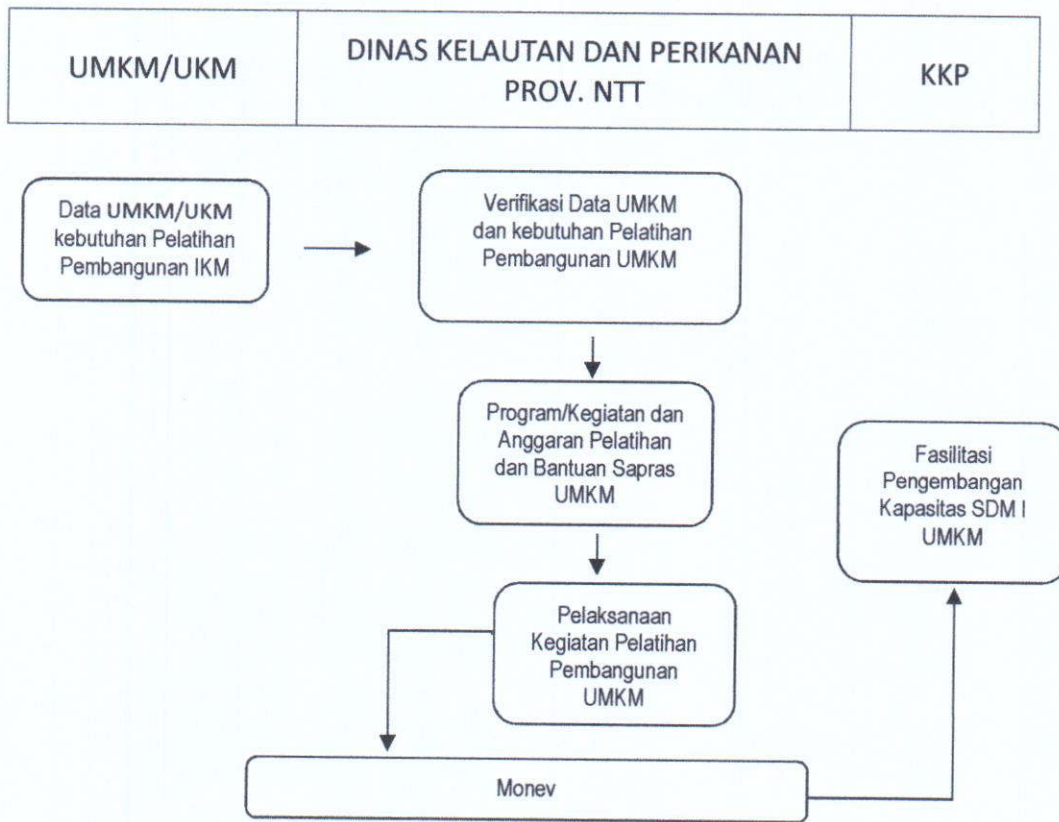


DKP-02.3.

PENERTIBAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN S/D 10 GT DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

Nelayan/Perusahaan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
--------------------	---	-----

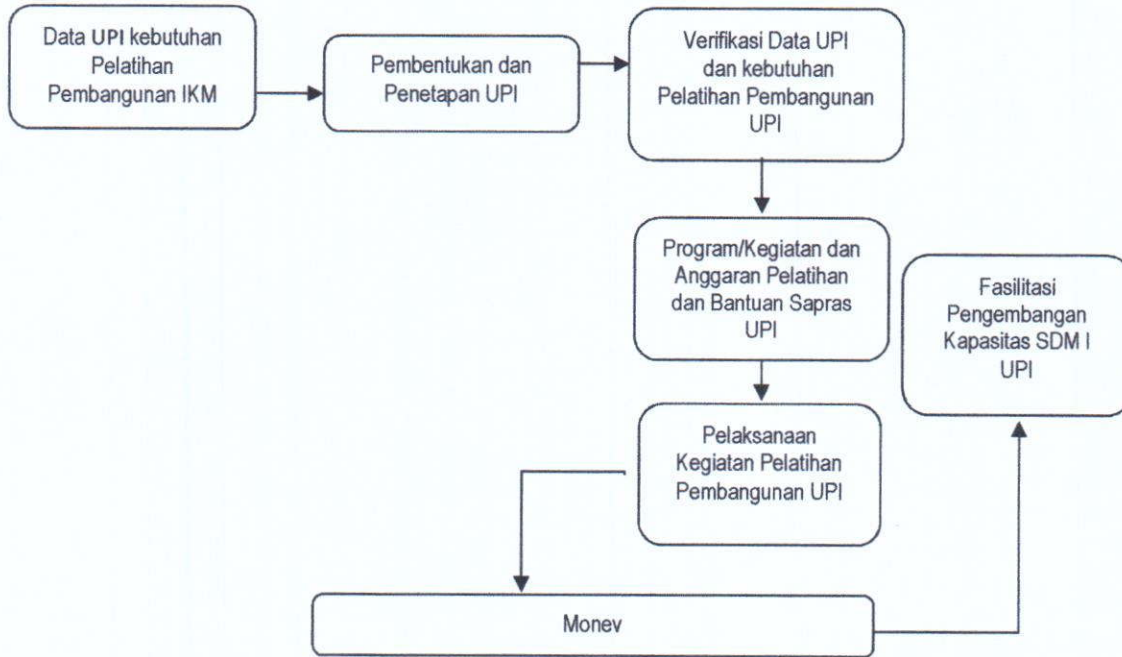




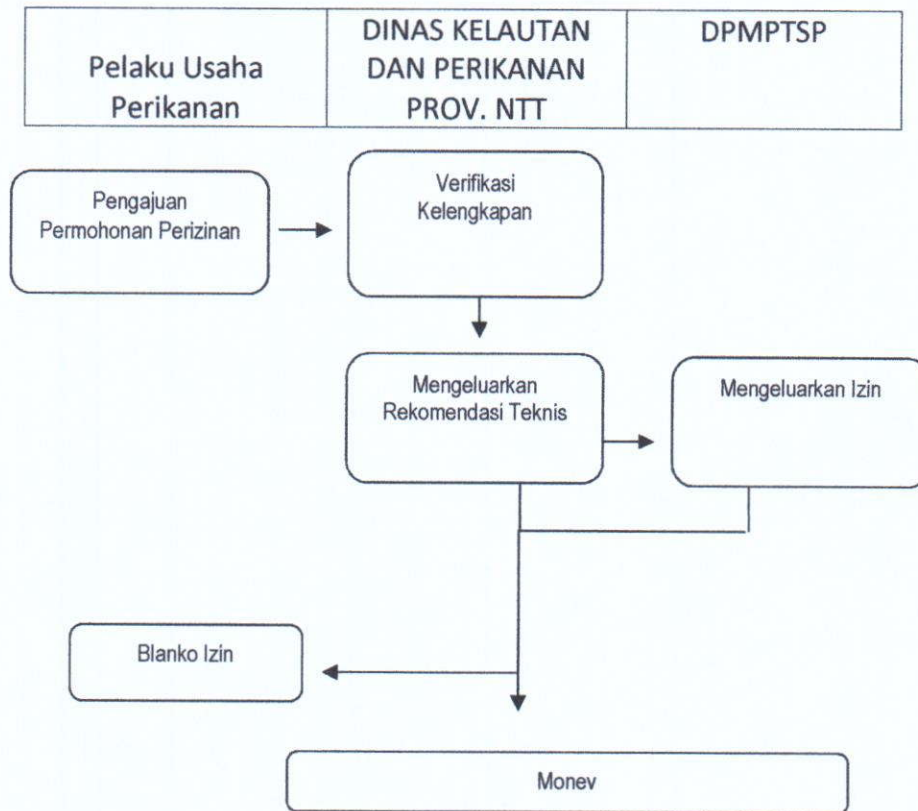
DKP-03.2.

PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR

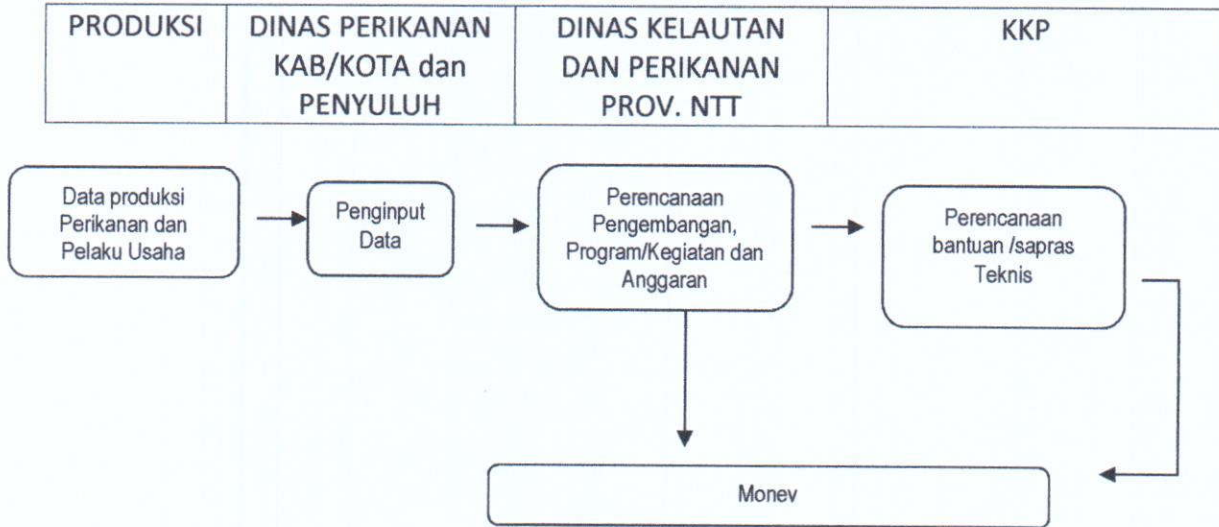
UPI	DINAS PERIKANAN KAB/KOTA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
-----	-----------------------------	--	-----



DKP-04.1.
 PENERTIBAN IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA IKAN YANG DIUSAHANYA LINTAS DAERAH
 KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

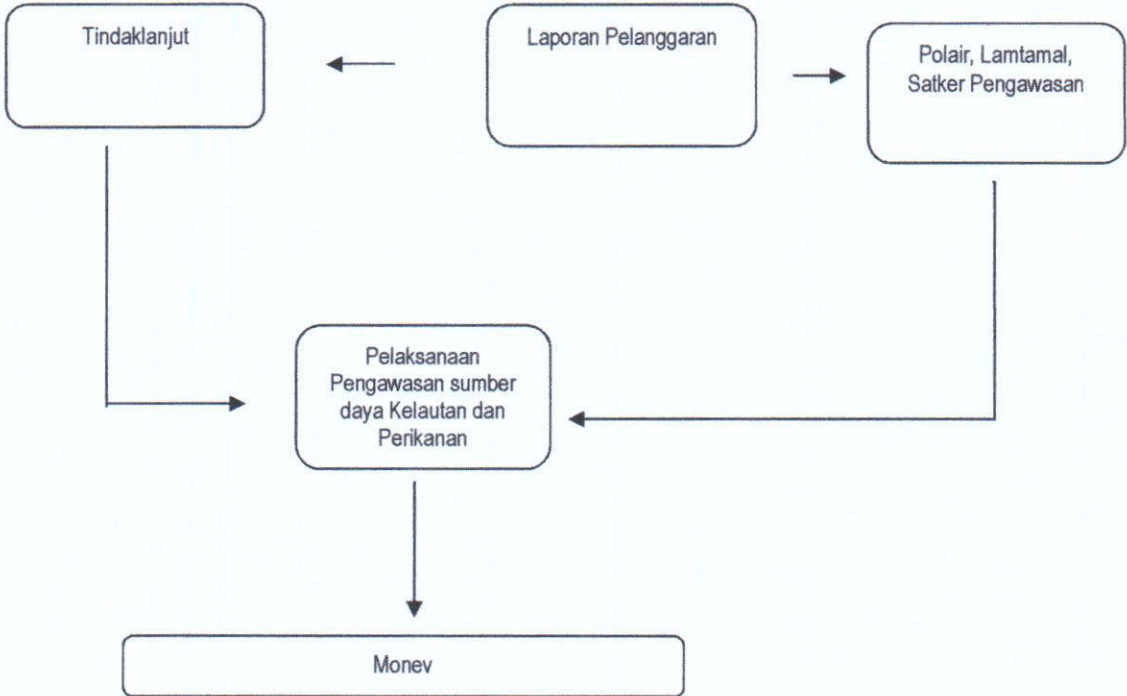


DKP-4.2.
PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DILAUT



DKP-05.1.
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

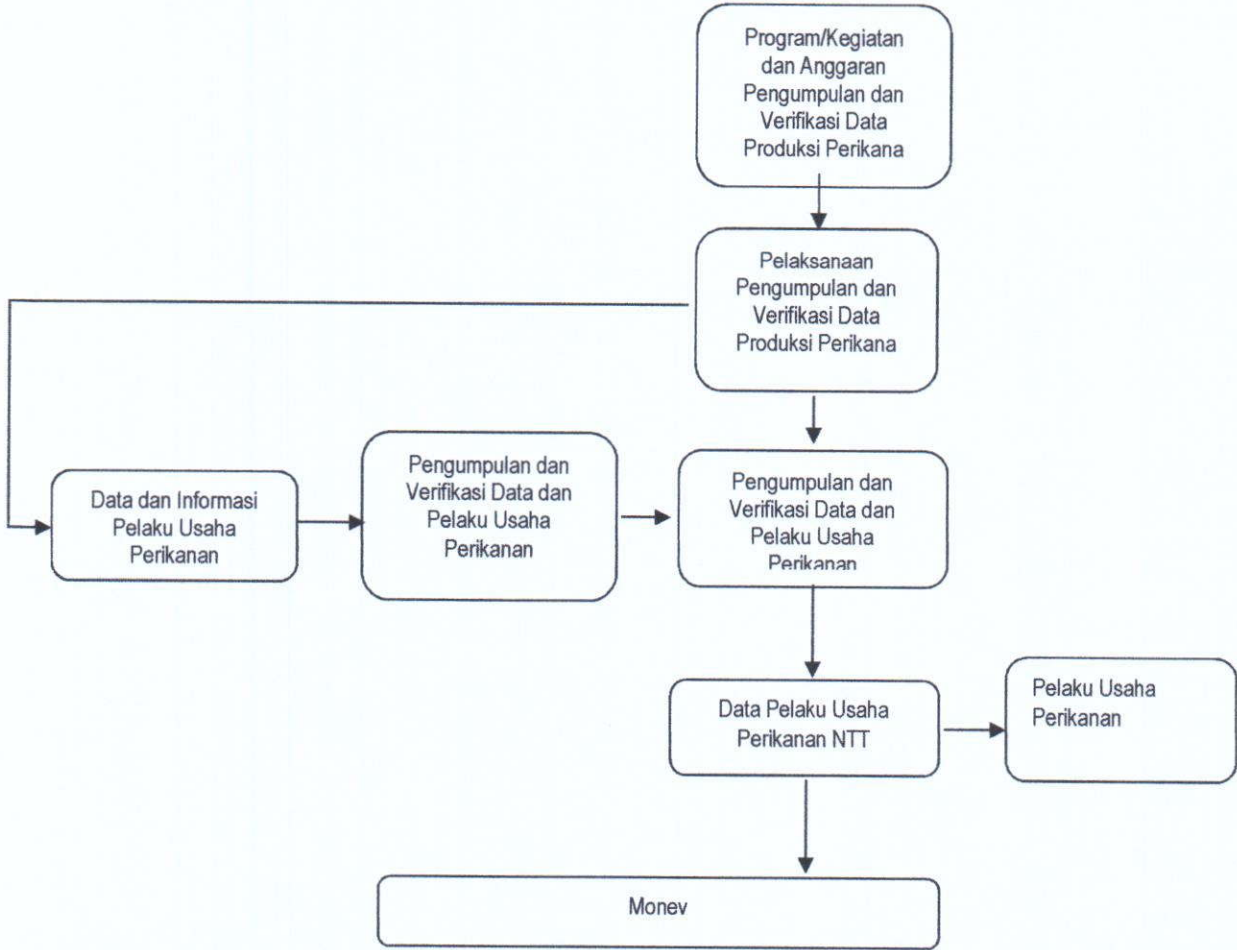
DINAS KELAUTAN dan PERIKANAN PROV. NTT	POKMASWAS	(FKPTPP) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan
---	-----------	--



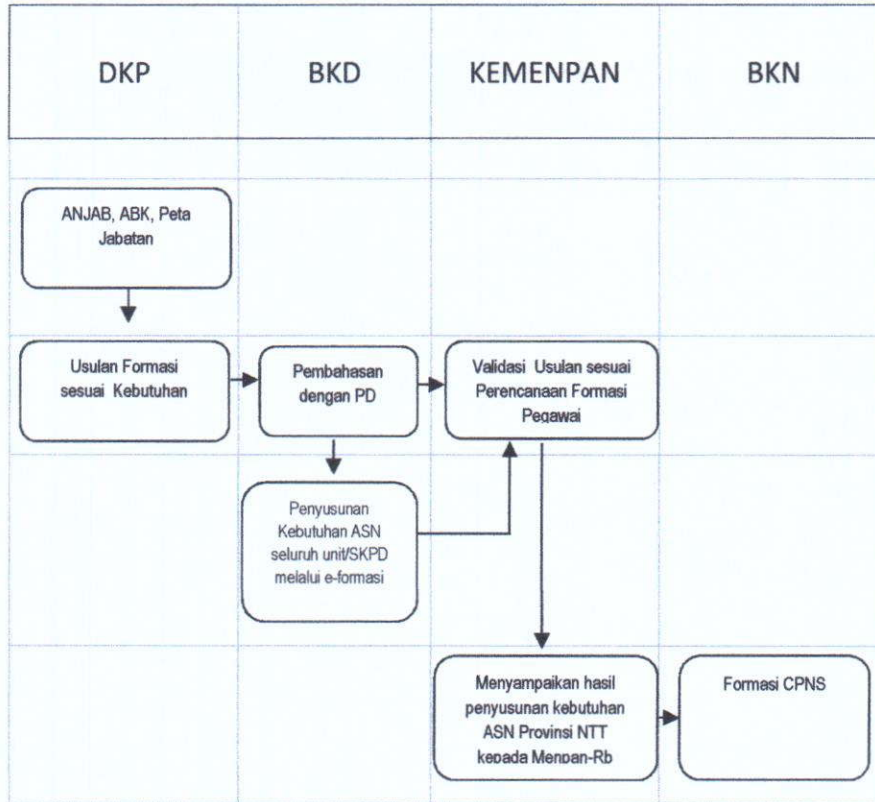
67

DKP-06.1.
PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

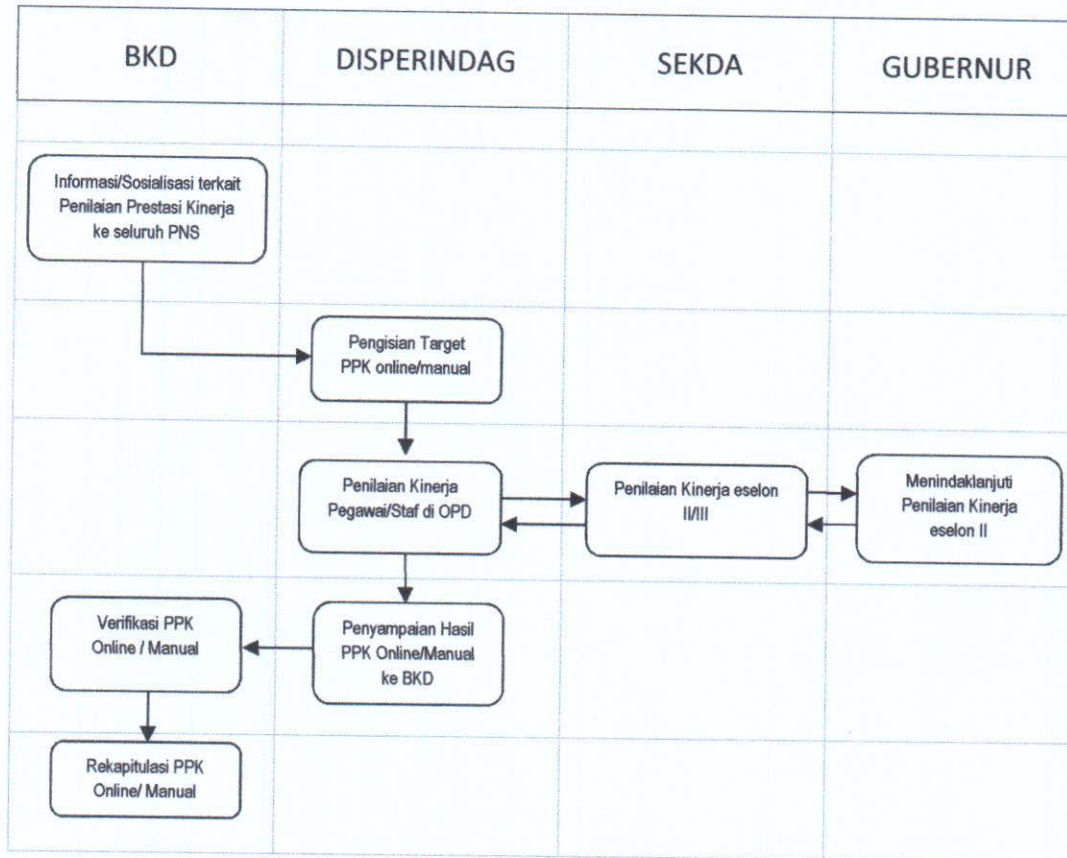
PRODUKSI PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KAB/KOTA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NTT	KKP
--------------------	--------------------------	--	-----



DKP-06.2
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

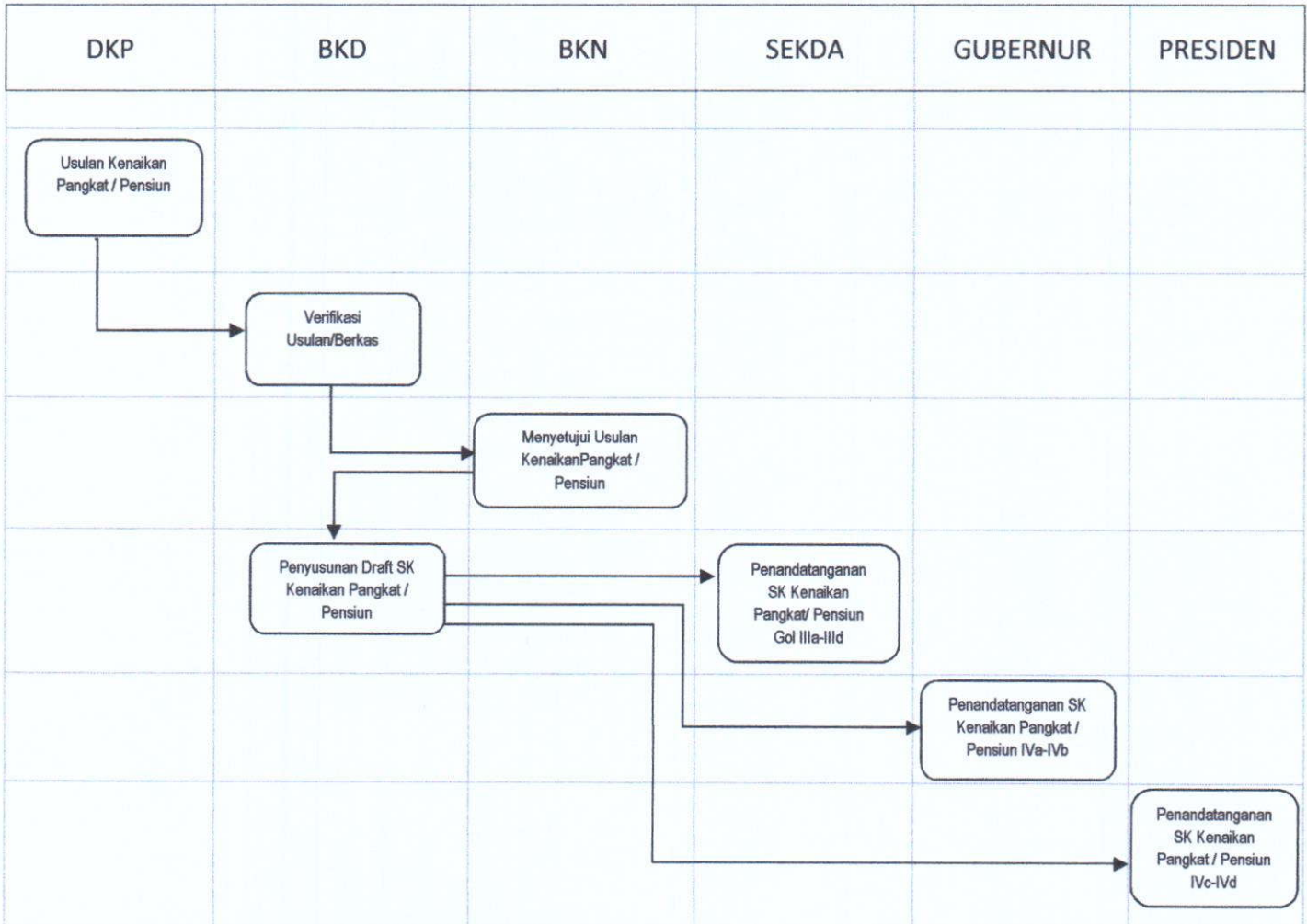


DKP-06.3 PENILAIAN PRESTASI KINERJA

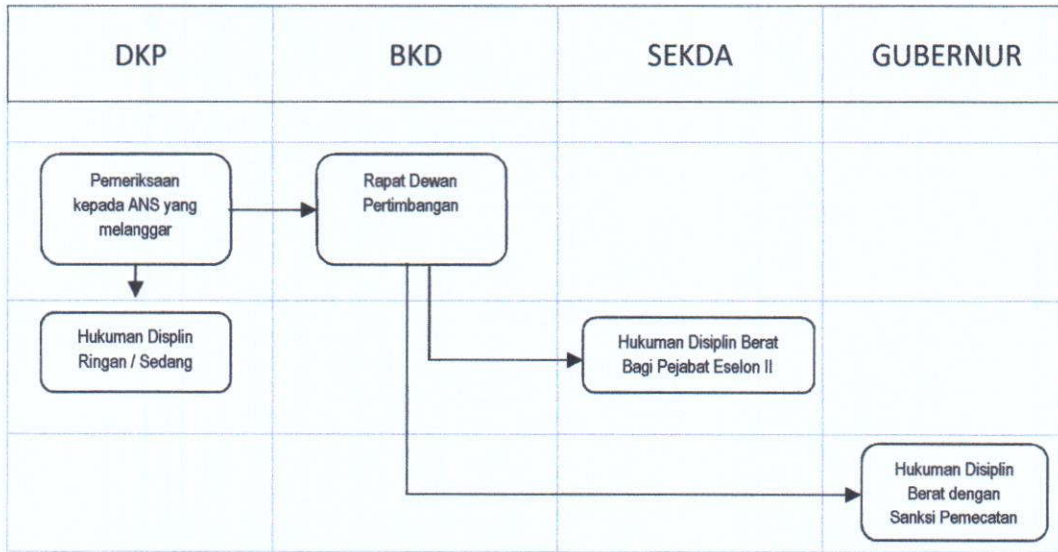


DKP-06.4

KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN

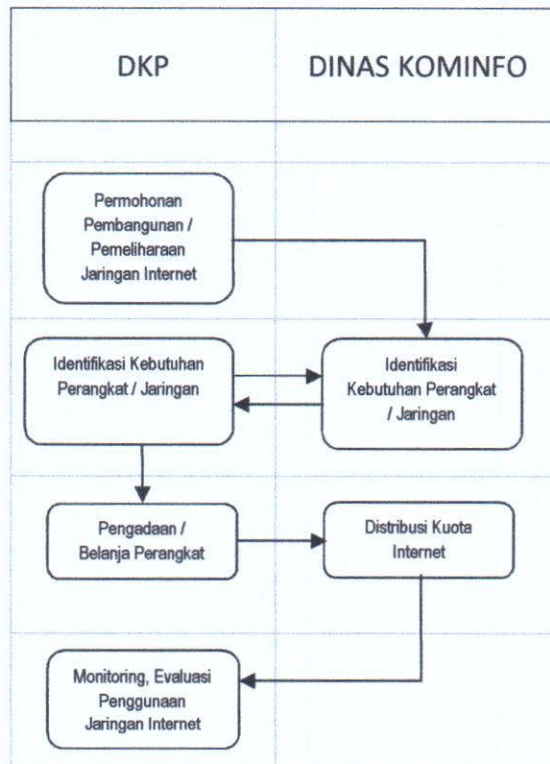


DKP-06.5 DISIPLIN PEGAWAI

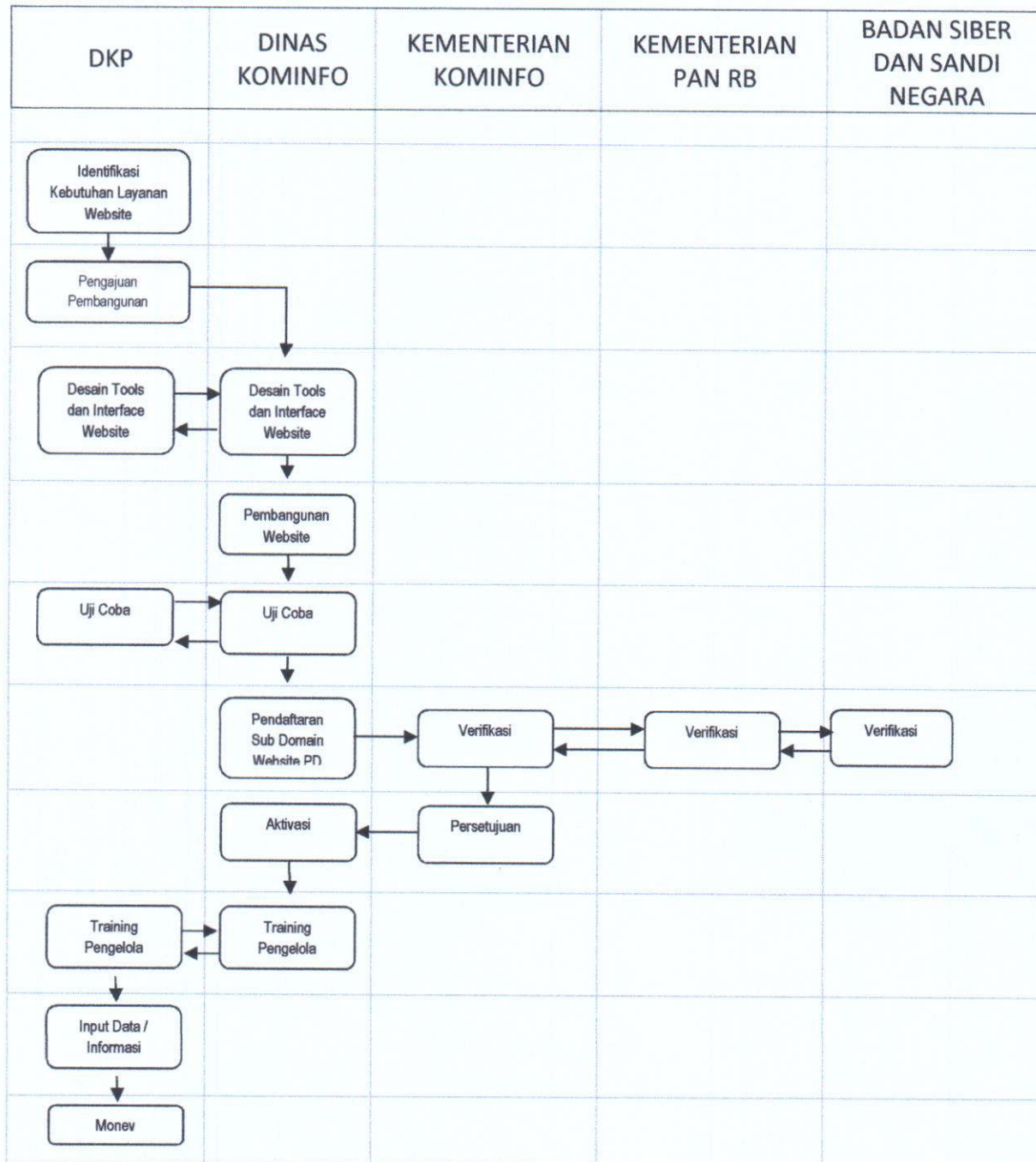


DKP-07.1

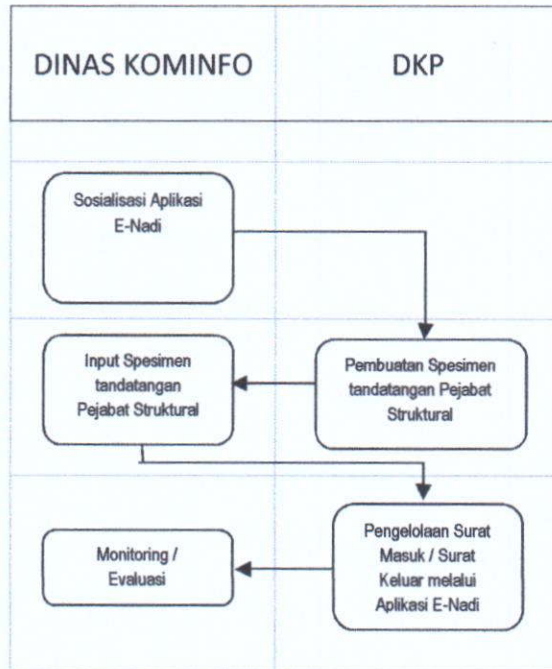
PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET



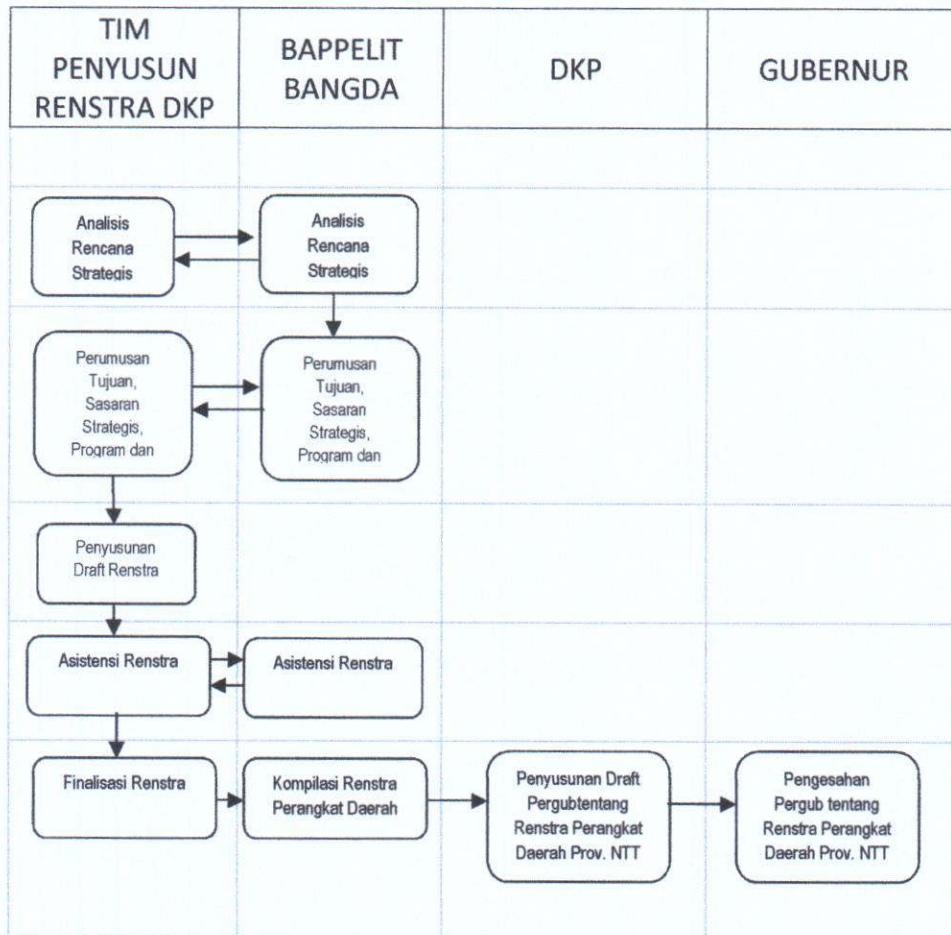
DKP-07.2 PENGELOLAAN WEBSITE

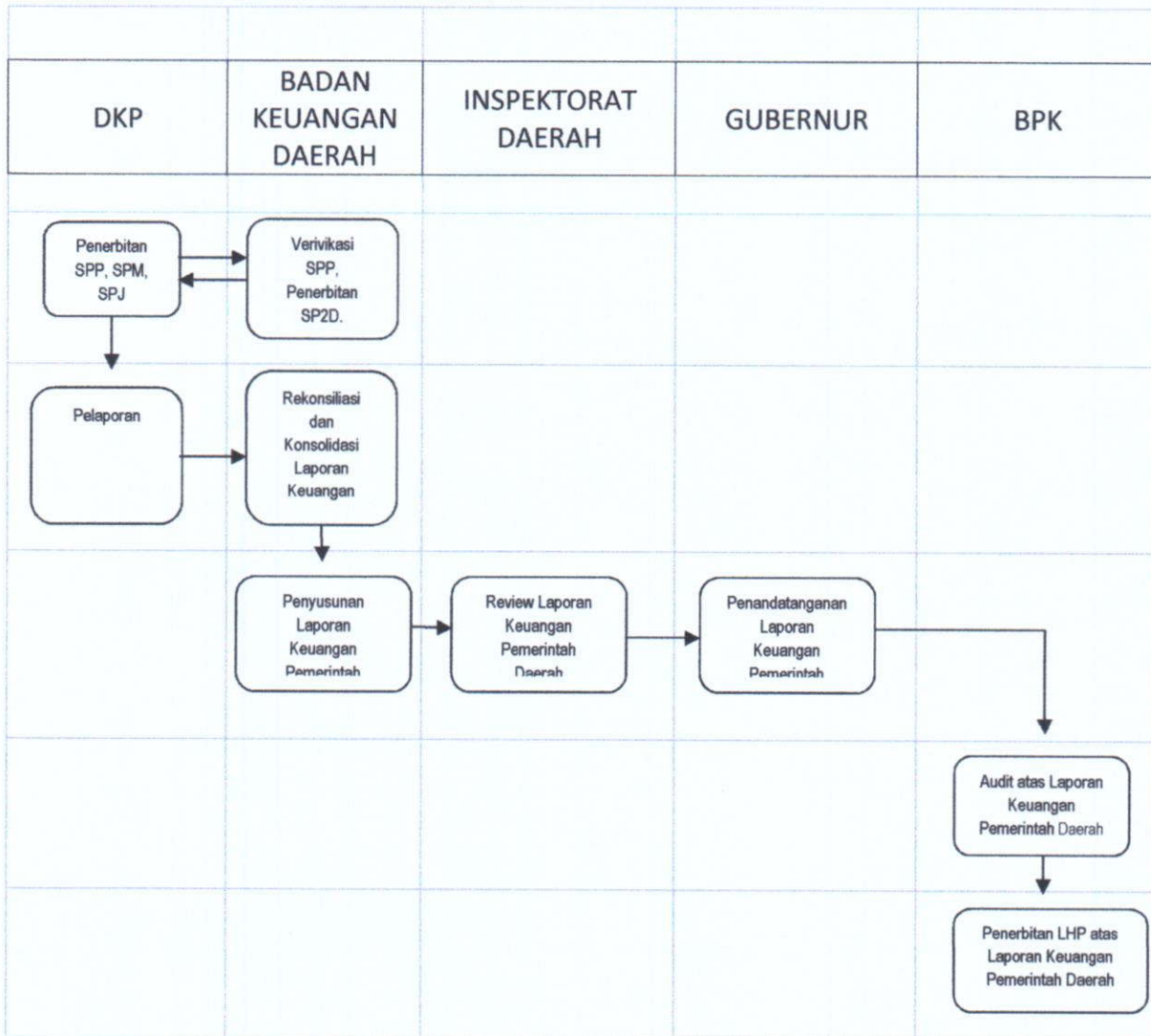


DKP 07.3 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI

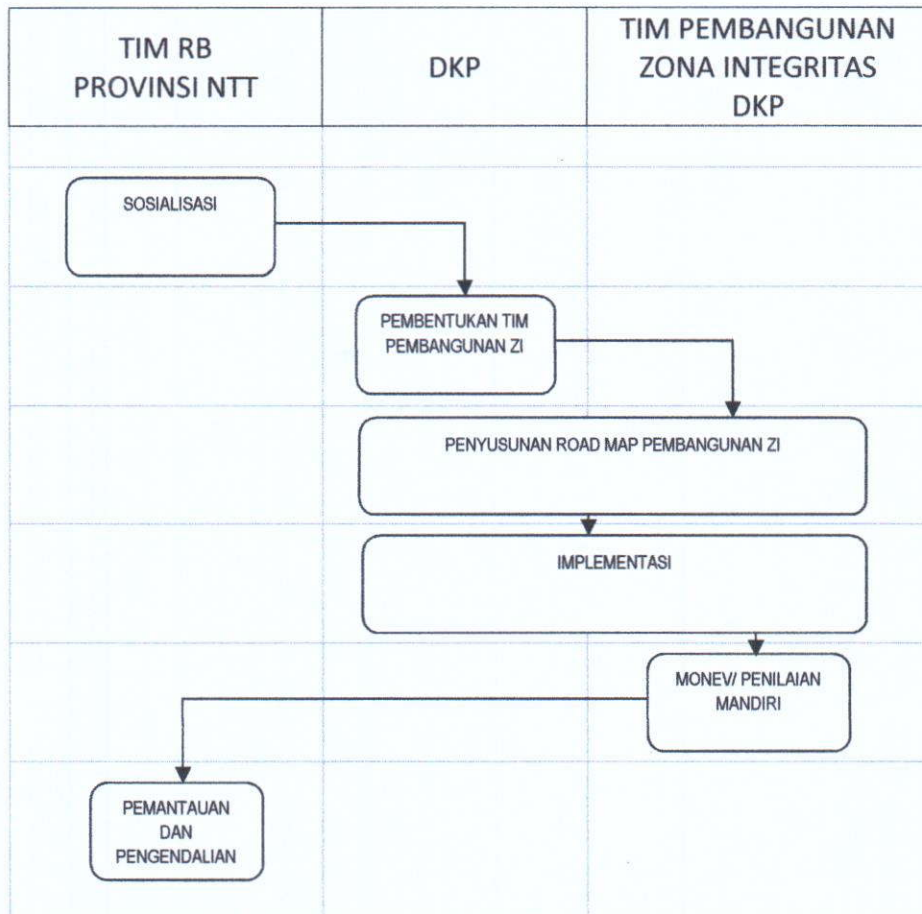


DKP-08.1 PERENCANAAN





DKP-10.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT